



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMBANGUNAN PARIWISATA RESORT KANDI

TESIS



DEDI SYAHENDRY
0821202015

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

Kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto Untuk Pengembangan Pariwisata Resort Kandi

Oleh : Dedi Syahendry

(Dibawah Bimbingan Prof. Dr. Afrizal, MA dan Dr. Erwin, M.Si)

Ringkasan

Semenjak tergulingnya rezim Orde Baru, dan berganti dengan Orde Reformasi, maka terjadi perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Dimana model pemerintahan yang sentralistik dicoba untuk dirubah menjadi pemerintahan yang desentralisasi, yang juga merupakan roh dari otonomi daerah. Salah satu sektor penunjang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah keuangan daerah. Pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah perlu melakukan inovasi dan kreativitas terutama dalam mengelola dan mengembang potensi yang ada di daerah tersebut. Pemerintah Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota yang saat ini sedang giat-giatnya dan serius mengembangkan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto

Kota Sawahlunto memiliki luas wilayah 273.45 Km² atau 27.345 Ha. Pada tahun 2004 karena sudah tidak lagi dimanfaatkan, PT.BA menyerahkan lahan pasca tambang di kawasan kandi-tanah hitam seluas 393,45 Ha. kepada Pemerintah Kota Sawahlunto, diiringi dengan biaya reklamasi sebesar Rp. 1.283.000.000, yang dimanfaatkan sebagai dana pengembangan objek wisata Resort Kandi.

Penelitian ini difokuskan pada kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam pengembangan objek wisata Resort Kandi, dan melihat faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari analisa diketahui bahwa dalam rangka pengembangan objek wisata Resort Kandi dibuat beberapa program dan kegiatan yang lebih dititik beratkan kepada bagaimana objek wisata Resort Kandi ini bisa lebih baik dan memiliki sarana wisata yang lebih bervariasi agar pengunjung tidak merasa bosan dan lebih lama menikmati objek wisata yang ada, dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Pengembangan Objek Wisata di era otonomi daerah

Sawahlunto Government Policies for Development Tourism Kandi Resort

By : Dedi Syahendry

(Counselore : Prof. Dr. Afrizal, MA and Dr. Erwin, M.Si)

Abstract

Since the overthrow of the previous regime, and replaced with the Order of the Reformation, then there has been a significant change in the implementation of government primarily related to local government. Where centralized governance model tested for conversion to a decentralized government, which is also the spirit of regional autonomy. One important sector in supporting implementation of regional autonomy is the financial area. Local government must have the financial resources are adequate so as to finance the government administration and regional development. In an effort to increase revenue (PAD) Local Government needs to make innovation and creativity, especially in managing and developing the potential that exists in the area. Sawahlunto government is one of the cities which is currently being actively and seriously to develop the tourism sector in order to increase revenue and to increase public welfare of Sawahlunto's people.

Sawahlunto has area of 273.45 km² or 27,345 hectares .In 2004 because it was no longer used , PT.BA submitted post- mining site in Kandi – Tanah Hitam area for 393.45 ha. to Sawahlunto Government, accompanied by a reclamation fee for Rp.1,283 billion, which is used as a development fund tourism object of Kandi Resort.

This study is focused on the policy pursued by the regional government of Sawahlunto in developing Kandi Resort, and viewed the supporting factors and obstacles in its implementation. The approach used in this study is a qualitative descriptive method. The results of the analysis note that in order to develop tourism object of Kandi Resort created several programs and activities that are focused more to how this tourism area can be better and have more varied tourist facilities so that visitors do not feel bored and longer enjoy the attractions There, by taking into account the factors supporting and inhibiting of the implementation.

Keywords : The Development of tourism object in regional autonomy era

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Penelitian : KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA RESORT
KANDI**

Nama Mahasiswa : DEDI SYAHENDRY

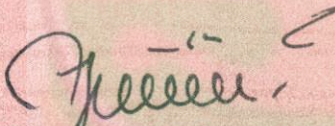
No. BP : 08 212 02 015

Program Studi : PWD Pemusatan Politik Lokal dan Otonomi Daerah


**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia ujian akhir
Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Andalas dan dinyatakan
lulus tanggal 31 Agustus 2010.**

Menyetujui

1. Komisi Pembimbing




Prof. DR. Afrizal, MA
Ketua





DR. Erwin, M.Si
Anggota

**2. Ketua Program Studi PWD
Pemusatan Politik Lokal dan
otonomi Daerah**



DR. Sri Zul Chairiyah, MA
NIP. 19530820 198702 2001

**3. Direktur Program Pascasarjana
Universitas Andalas**



Prof. DR. Ir. H. Novirman Jamarun, M.Sc
NIP. 19551106 198003 1001

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 11 Juli 1978 di Kota Sawahlunto. Dari pasangan orang tua Syaharuddin dan Zahari. Penulis merupakan anak ke-5 dari 6 bersaudara.

Pada tahun 1984, penulis untuk pertama kali mengikuti kegiatan pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri 7 Kota Sawahlunto, dan tamat pada tahun 1990. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada SMPN 1 Sawahlunto dan tamat pada tahun 1993. Pendidikan Sekolah Menengah Atas, penulis lanjutkan di SMAN 1 Sawahlunto dan tamat pada tahun 1996.

Untuk pendidikan kesarjanaan, penulis lanjutkan pada tahun 1998 melalui Diploma IV Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor dan tamat pada tahun 2002.

Pada tahun 2002, penulis memulai karir sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berdinasi pada Kantor Kepegawaian Daerah Kota Sawahlunto. Lima bulan kemudian, penulis diberikan tugas sebagai Kasi Pembangunan pada Kantor Lurah Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, pada awal tahun 2005 Penulis diberi amanah sebagai Lurah Kubang Sirakuk Selatan Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto dan pada akhir tahun 2006 ditugaskan sebagai Sekretaris Camat Lembah Segar Kota Sawahlunto. Pada awal tahun 2008 penulis dimutasikan pada jabatan yang baru yakni Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto sampai sekarang.

Pada tahun 2008, penulis diberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan pendidikan S.2 pada Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan pemusatan Politik Lokal dan Otonomi Daerah Pascasarjana Universitas Andalas Padang.

Padang, Agustus 2010



DEDI SYAHENDRY

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul :

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA RESORT KANDI

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, agustus 2010
Yang membuat pernyataan


DEDI SYAHENDRY
No. BP. 0821202015



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dengan judul **Kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto Untuk Pengembangan Pariwisata Resort Kandi**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam menyelesaikan Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Bapak Prof.Dr.Ir. Novirman Jamarun, M.Sc beserta seluruh civitas akademika.
2. Ketua Program Study PWD Pemusatan Politik Lokal dan Otonomi Daerah Ibu Dr. Sri Zul chairiyah, MA beserta seluruh Staf.
3. Bapak Prof.Dr. Afrizal, MA sebagai ketua komisi pembimbing serta kepada Bapak DR. Erwin. M.Si sebagai anggota komisi pembimbing yang telah memberikan pengarahan dalam penulisan tesis ini. Juga kepada Ibu Dr. Sri Zulchairiyah, MA dan Bapak Dr. Azwar, M.Si, serta Bapak Drs. Syaiful, M.Si, sebagai dosen penguji dari awal penulisan tesis ini.
4. Bapak Gusrial, BSc selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto beserta jajaran yang telah membantu penulis dalam menyediakan data untuk kebutuhan penelitian ini.

5. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Program Study PWD Pemusatan Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Andalas yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.

Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang setimpal atas amalan dan bantuannya.

Terutama buat Ibunda tercinta Zahari (Almh) dan Ayahanda Syaharuddin, yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang sehingga aku bisa menjalani kehidupan seperti saat ini, semoga Ibunda tenang disisi-Nya dan mendapatkan Sorga Jannatunna'im Amin Ya Robbal Alamin. Ibu Mertua Hj. Jusni dan Bapak Mertua H. Yasril Bahar Dt. Rj. Nan Sati, yang selalu memberikan pituah dan nasehat demi keberhasilanku.

Teristimewa buat Isteriku Tercinta Fatmi Dona Aisyah, SP yang selalu setia menemaniku dalam suka dan duka, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi demi keberhasilanku. Dan Kedua belahan jiwaku Nailah Fakhirah Denata dan Muhammad Shadiq Denata, yang telah memotivasi kehidupanku.

Keluarga besarku Da Andi, Da Ef, Penduk, Sobur dan Pipit, beserta seluruh ipar dan ponakanku, juga seluruh Mak Rumah dan Ipar, Da Wing, Da Yon, Da Peri, Anyuk, dan Nopit, beserta keluarga yang selalu memberikan dukungan kepadaku.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil-hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis ini akan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah.

Sawahlunto, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Pemikiran.	14
1. Kebijakan Publik	14
2. Implementasi Kebijakan.....	15
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Pariwisata	 20
4. Kerangka Pemikiran.....	24
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	 25
A. Desain Penelitian.....	25
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Teknik Analisis Data	31
E. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
1. Geografis	34
2. Demografis	38

3. Gambaran Umum Resort Kandi.....	38
4. Perekonomian.....	42
B. Kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto Untuk Pengembangan Objek Wisata Resort Kandi.....	49
B.1. Kebijakan	49
B.2. Implementasi Kebijakan	60
C. Program Untuk Mengimplementasikan Kebijakan.....	70
D. Hasil Implementasi Kebijakan.....	79
E. Faktor-faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Proses Pengembangan Kawasan Wisata Kandi.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
3.1. Jenis Informan dan Data Yang dibutuhkan	30
4.1. Luas Wilayah Resort Kandi	39
4.2. PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 Sampai Dengan Tahun 2008 termasuk Batu Bara (Jutaan Rupiah)	46
4.3. PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 Sampai Dengan Tahun 2008 termasuk Batu Bara (Jutaan Rupiah)	48
4.4. Program dan Kegiatan dalam Pengembangan Objek Wisata Resort kandi	75
4.5. Jumlah Kunjungan Objek Wisata Resort Kandi Tahun 2007 Sampai Tahun 2009	80



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Peta Administrasi Kota Sawahlunto.....	37
2. Peta Tanah Pasca Tambang Terbuka PT.BA (Persero) TBK-UPO yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Sawahlunto (Kawasan Kandi)	41
3. Master Plan Resort Wisata Kandi.....	59
4. Objek Pacuan Kuda Kandi.....	61
5. Objek Breeding Farm kandi	62
6. Objek Taman Satwa Kandi.....	63
7. Objek Rekreasi Air Danau Tandikat.....	63
8. Objek Dermaga Danau kandi	64
9. Objek Road Race Kandi	65
10. Objek Motor Cross Tanah Hitam	66
11. Struktur Organisasi Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto	71
12. Struktur Organisasi UPTD Kandi	82

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak tergulingnya rezim Orde Baru yang telah mengatur roda pemerintahan Republik Indonesia kurang lebih selama tiga puluh dua tahun, dan berganti dengan Orde Reformasi yang diawali dengan lengsernya pemimpin Orde Baru yaitu Suharto dan digantikan oleh BJ. Habibie terjadi perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemerintahan yang sentralistik diubah menjadi pemerintahan yang desentralisasi, yang juga merupakan roh dari otonomi daerah. Otonomi daerah masa orde reformasi diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah menurut Rondinelli dan Cheema sebagai mana yang dikutip oleh M. Mas'ud Said (2005:6) adalah "Proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi kepada unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi-otonom dan *parastatal* (teks aslinya berhuruf miring), ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah". Menurut Bank Dunia yang juga dikutip oleh M. Mas'ud Said (2005 : 6) otonomi daerah adalah "Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi pemerintah pemerintah yang menjadi bawahannya atau yang bersifat semi-independen dan atau kepada sektor swasta".

Sementara itu otonomi daerah menurut M. Mas'ud Said (2005:6) adalah sebagai berikut :

Otonomi daerah dipahami sebagai sebuah proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan propinsi dan kabupaten/kota. Dengan kata lain, dalam konteks Indonesia, penelitian ini mendefinisikan otonomi daerah sebagai sebuah proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat di Jakarta kepada baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan oleh UU.

Dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya Otonomi daerah adalah penyerahan atau pelimpahan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dan dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah lebih mampu untuk mengembangkan semua potensi sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan rakyat.

Konsep Otonomi Daerah, pada hakekatnya, mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administrative, menurut prakarsa sendiri. Dalam konteks ini maka kebebasan dalam pengambilan keputusan dengan prakarsa sendiri suatu yang niscaya. Oleh karena itu kemandiriab daerah suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat. Ketidak mandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada pusat. (Romli:2007:7).

Menurut pandangan Smith (Romli:2007:7) ada beberapa tujuan penerapan kebijakan desentralisasi, pertama, desentralisasi diterapkan dalam upaya untuk pendidikan politik. Kedua, untuk latihan kepemimpinan politik. Ketiga, untuk memelihara stabilitas politik. Keempat, untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di Pusat. Kelima, untuk memperkuat akuntabilitas publik. dan keenam, untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu yang berkaitan dengan alasan, ada tiga alasan mengapa menerapkan kebijakan desentralisasi. Pertama, untuk menciptakan efesiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Kedua, untuk memperluas otonomi daerah. Ketiga, untuk beberapa kasus, sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik, (Romli:2007:7). Sedangkan menurut nelson kasfir, alasan menerapkan desentralisasi lebih didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi daerah (Romli:2007:7).

Salah satu sektor penunjang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah keuangan daerah. Pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana daerah dapat membiayai hal tersebut tergantung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber daya ekonomi lainnya (Romli:2007:55).

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah perlu melakukan inovasi dan kreativitas terutama dalam mengelola dan mengembang potensi yang ada di daerah tersebut. Pemerintah Kota Sawahlunto

merupakan salah satu kota yang saat ini sedang giat-giatnya dan serius mengembangkan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto.

Kota Sawahlunto mempunyai potensi yang cukup besar disektor pariwisata. Visi Kota Sawahlunto adalah mewujudkan Kota Wisata Tambang yang Berbudaya tahun 2020 melalui kegiatan penataan institusi, kerjasama antara daerah, meningkatkan fisik kota dan meningkatkan kualitas produk wisata. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah perencanaan penataan dan revitalisasi kawasan Kota Sawahlunto yang memiliki beberapa objek yang sangat menarik untuk dikembangkan sebagai salah satu tujuan objek wisata seperti kawasan kota lama Sawahlunto dan Kawasan Resort Kandi.

Resort Kandi ini memiliki keunikan sehingga berpotensi untuk dijadikan kawasan wisata karena pada lokasi ini terdapat beberapa danau yang terbentuk dari hasil penggalian tambang batu bara, dan juga pada kawasan ini terdapat tempat pacuan kuda yang terletak diatas bukit dan kawasan ini juga memiliki pemandangan yang sangat indah. Berbagai potensi objek wisata tersebut masih perlu untuk dikembangkan baik dari aspek tata ruang, investasi, informasi dan aspek lainnya yang terkait dengan perkembangan pariwisata daerah.

Visi pembangunan Kota Sawahlunto didasarkan kepada Peraturan Daerah (Perda) No. 2 tahun 2001 yaitu menjadi *Kota Wisata Tambang yang Berbudaya pada tahun 2020*. Pada dasarnya tahun 2020 ini dimaksudkan agar target waktu pencapaian tersebut dapat merangsang munculnya motivasi bagi Pemerintah Kota dan seluruh Stakeholders. Sedangkan berbudaya dimaksudkan agar dalam upaya

mewujudkan Kota Wisata Tambang tersebut seluruh masyarakat dan stakeholders dapat beraktifitas, berkreasi dan berinovasi seluas-luasnya. Namun harus tetap berpedoman kepada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengembangkan pariwisata, nilai-nilai agama dan adat harus menjadi dasar dan pedoman bagi masyarakat dalam kehidupannya, sehingga tidak bertentangan dengan nilai agama dan adat.
2. Sarana, prasarana dan utilitas kota ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya seiring dengan peningkatan pelayanan umum.
3. Obyek wisata tambang yang potensial digali, ditumbuhkan, dikembangkan, dilestarikan dan dikemas sebagai paket wisata.
4. Seluruh potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, baik masyarakat maupun aparat Pemerintah harus diarahkan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat mendorong berkembangnya pariwisata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto, maka Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Sawahlunto dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Arahana Pengembangan dan Distribusi Penduduk

Arahana pengembangan kependudukan didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk untuk tahun 2014 serta perkiraan kebutuhan jumlah perumahan yang dapat dibangun pada areal lahan yang tersedia. Wilayah dengan jumlah penduduk

tertinggi adalah Kecamatan Talawi dan terendah Kecamatan Silungkang. Namun bila ditinjau dari tingkat kepadatannya, Kecamatan Silungkang mempunyai kepadatan tertinggi dan terendah Kecamatan Talawi.

2. Rencana Struktur Pusat Pelayanan

Rencana sistem pelayanan kota tidak terlepas dari rencana pengembangan dan distribusi penduduk. Hasil proyeksi penduduk serta sebarannya merupakan pertimbangan dasar dalam membuat perkiraan kebutuhan lahan perumahan dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

Untuk menghindari terjadinya pemusatan penduduk yang terkonsentrasi di pusat kota lama, maka penyebaran penduduk diarahkan ke kawasan Kolok dan Talawi serta wilayah-wilayah *interland*-nya. Dengan kata lain sistem pusat pelayanan yang terbaik adalah sistem pusat yang mampu mewujudkan pemerataan penduduk dan fasilitas pendukungnya. Atas dasar tujuan ini maka pendekatan re-distribusi fungsi kegiatan perkotaan merupakan pendekatan yang optimal untuk diterapkan, maka sistem pusat pelayanan kota yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1) Pusat Pelayanan Utama

Pusat pelayanan utama adalah pusat Kota Lama yang mempunyai fungsi utama sebagai pusat perdagangan, jasa, permukiman, pariwisata dan perkantoran. Sebagai pusat perdagangan, pelayanan kegiatannya mencakup seluruh kawasan Kota Sawahlunto dan untuk beberapa komoditi mencakup tingkat regional (kegiatan perdagangan antar kota). Sebagai pelayanan jasa yang berskala kota antara lain adalah pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi dan telekomunikasi, asuransi, perbankan, pos dan giro, jasa konstruksi dan tempat ibadah serta pelayanan jasa

lainnya. Sedangkan sebagai pusat permukiman dan perkantoran pada kawasan ini akan dilakukan penataan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah. Saat ini kawasan ini mulai direvitalisasi sehingga mempunyai daya tarik untuk objek wisata.

2) Sub Pusat Pelayanan Utama

Sub Pusat Pelayanan Utama meliputi Kawasan Talawi, Sijantang, Kolok, Muaro Kalaban dan Silungkang mempunyai fungsi sebagai pelayanan pendidikan, kesehatan, perkantoran, perdagangan, pasar, tempat ibadah, sub-terminal, terminal regional (di kawasan Muaro Kalaban), wisata dan pelayanan penunjang lainnya yang mempunyai skala pelayanan tingkat kota dan tingkat kecamatan.

c. Aksesibilitas Pusat Kota dan Sub Pusat Kota

Akses antara Pusat kota dan Sub Pusat Kota dihubungkan dengan sistem jaringan jalan dan terminal penumpang/barang. Terminal Kota diarahkan di pusat kota Sawahlunto sedangkan pada setiap kecamatan dikembangkan sub-terminal.

Rencana pola pemanfaatan ruang Kota Sawahlunto tahun 2014 sebagai berikut :

- 1) Kawasan Budidaya Perkotaan yang meliputi Perumahan dan Permukiman, Perdagangan dan Jasa, Industri, Pendidikan, Perkantoran dan Jasa, Terminal, Wisata dan Taman Rekreasi, Pertanian dan Perkebunan, Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pembuangan Sampah.
- 2) Kawasan Lindung yang meliputi Kawasan perlindungan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, Sempadan Sungai, Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau, perlindungan terhadap sekitar Waduk dan Mata Air,

Perlindungan Kawasan Hutan Kota, Perlindungan Kawasan Hijau, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana.

Sesuai dengan agenda Mewujudkan Kota Wisata Tambang yang berbudaya (Agenda 2002 – 2020) dimana untuk mencapai visi dan misi sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, maka Pemerintah Kota Sawahlunto telah menetapkan empat hal yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Kapasitas Institusi,
- 2) Kerjasama Antar Daerah,
- 3) Peningkatan Kualitas Kota dan
- 4) Peningkatan Kualitas Produk dan Kawasan wisata.

Dengan disadari kondisi Kota Sawahlunto yang sedikit berbeda dengan kota-kota lain di Propinsi Sumatera Barat maka jenis pariwisata yang dikembangkan meliputi 5 (lima) jenis :

- 1) Culture Tourism/Wisata Budaya
- 2) Mining Tourism/Wisata Tambang
- 3) Recreation Tourism/Wisata Rekreasi
- 4) Agro Tourism/ Agro Wisata
- 5) Sport Tourism / wisata olahraga

Kawasan Resort Kandi yang menjadi objek penelitian penulis saat ini merupakan salah satu objek wisata yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto yang menggabungkan beberapa jenis pariwisata tersebut di atas, yakni Wisata Rekreasi (Recreation Tourism) dan Wisata Olahraga (Sport Tourism). Penggabungan kedua jenis pariwisata tersebut dikarenakan kawasan tersebut memiliki areal yang cukup luas, yaitu seluas 393,45 Ha.

Dalam pengembangan pariwisata Resort Kandi sampai saat ini pengelolaannya masih dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, karena belum adanya pihak ketiga atau investor yang mau untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut. Untuk itu dibutuhkan keseriusan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam proses pengembangannya, dan dukungan dari pihak legislatif (DPRD) serta Stake Holder dan seluruh lapisan masyarakat Kota Sawahlunto.

Beranjak dari asumsi di atas dalam tesis ini penulis berkeinginan untuk membahas tentang kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam pengembangan objek wisata Resort Kandi serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaannya.

B. Rumusan Masalah

Pemerintah Kota Sawahlunto berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata dan salah satunya adalah pengembangan Resort Kandi. Pengembangan Resort Kandi berawal dari adanya penyerahan lahan seluas 393,45 Ha, yang merupakan lahan bekas tambang PT.Bukit Asam yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, oleh PT.BA. penyerahan lahan ini dilakukan dengan Surat Kesepakatan dan Perjanjian nomor : 06/08.04/2400000002/XI-2004 dan nomor : 180/11/Huk-Org/2004 tentang Penyerahan Lahan Pasca Tamka. Dalam surat kesepakatan dan perjanjian tersebut juga dituangkan bahwa penyerahan lahan tersebut disertai dengan dana reklamasi yang dibayarkan oleh PT.BA kepada Pemerintah Kota Sawahlunto sebesar Rp.1.283.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah), dan juga rencana pemanfaatan lahan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dengan

memanfaatkan dana reklamasi yang diberikan, yaitu untuk pengembangan objek wisata resort kandi.

Pengembangan Resort Kandi didukung pula oleh legislatif Kota Sawahlunto. Hal ini terbukti dengan dianggarkannya dalam APBD Kota Sawahlunto setiap tahun sejak tahun 2005 dalam rangka pengembangan objek wisata Resort Kandi,

Penelitian ini lebih difokuskan kepada kebijakan pemerintah Kota Sawahlunto untuk pengembangan pariwisata khususnya wilayah Resort Kandi. karena pada saat ini Resort Kandi merupakan salah satu objek wisata di Kota sawahlunto yang memiliki sumber daya alam yang bagus untuk dikembangkan, serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Kebijakan dan Program apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sawahlunto dalam pengembangan objek wisata Resort Kandi ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pengembangan objek wisata Resort Kandi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan dan program Pemerintah Kota Sawahlunto dalam pengembangan objek wisata Resort Kandi.

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pengelolaan objek wisata pada khususnya dan program-program pengembangan kepariwisataan pada umumnya. Manfaat akademis maupun praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur terhadap kajian studi Politik Lokal Otonomi Daerah khususnya mengenai pengembangan kepariwisataan.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

Berikut ini beberapa hasil penelitian tentang pengembangan wisata alam (ekowisata) yang dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Partomo pada tahun 2004, tentang Formulasi strategi pengembangan ekowisata di taman nasional gunung gede pangrango, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor strategi yang mempengaruhi pengembangan ekowisata, merumuskan alternatif strategi dan menetapkan prioritas strategi pengembangan ekowisata di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang secara administratif terletak pada wilayah Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan jenis penelitian deskriptif. Informasi diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Pengambilan contoh dilakukan secara purposive sampling yang melibatkan pengelola taman nasional, praktisi ekowisata, tour operator dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Alat analisis yang digunakan adalah IFE (Internal Factor Evaluation), EFE (External Factor Evaluation), IE (Internal-External), SWOT (Threats, Opportunities, Weakness, Strength) dan QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muryono pada tahun 2004 tentang Pengembangan Ekowisata Di Kawasan Taman Nasional Baluran Jawa Timur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Mengidentifikasi aspek supply dan demand terhadap pengembangan ekowisata di kawasan Taman Nasional Baluran,

Menentukan tata ruang bagi pengembangan ekowisata berikut jenis aktivitas ekowisata yang dapat dilakukan dan daya dukung kawasan Taman Nasional Baluran, Menyusun model pengembangan ekowisata di Taman Nasional Baluran. Penelitian dimulai dengan menginventarisasi potensi penawaran bagi pengembangan ekowisata yang terdiri dari potensi biofisik, potensi sejarah, budaya, kegiatan wisata yang ada disekitar dan potensi sarana dan prasarana. Untuk memperoleh potensi permintaan ekowisata, data dan informasi yang diperlukan meliputi karakteristik wisatawan, persepsi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam bentuk informasi aktivitas, minat dan opini mereka melalui wawancara dan pengisian kuisioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis evaluatif yang meliputi analisis kapasitas sumber daya alam, analisis kapasitas sumber daya manusia, analisis tata ruang, analisis keuangan, analisis pasar ekowisata dan analisis SWOT.

Berbeda dengan penelitian yang telah penulis lakukan yaitu tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Resort Kandi Kota Sawahlunto, yang menitik beratkan pada kebijakan dan program apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kota sawahlunto dalam rangka pengembangan objek wisata Resort Kandi, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaannya.

B. Kerangka Pemikiran

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau yang lebih dikenal dengan istilah *Public Policy* merupakan bidang kajian yang amat penting dalam ketatalaksanaan pemerintahan, terlebih dalam proses pembuatan kebijaksanaan yang melibatkan masyarakat, maka kajian kebijakan publik ini menjadi suatu hal yang mutlak untuk dilakukan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak lepas dari pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang saling terkait. Sebagai sebuah proses peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan adalah konteks dimana kebijakan beroperasi. Sementara itu kebijakan yang menunjuk pada kerangka kerja pembangunan, memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan ke dalam beragam program dan kegiatan (Edi Suharto:2005:1).

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt (1973) yang dikutip oleh Edi Suharto (2005:7), kebijakan publik adalah "keputusan tetap" yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*Repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Sementara itu Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan

adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan.

Sementara itu *Thomas R. Dye* mengatakan bahwa kebijakan publik adalah "Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Dan *Richard Rose* mengatakan bahwa kebijakan publik adalah "Serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri". Serta *James Anderson* mengatakan kebijakan publik adalah "Arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan".

Dari pengertian pengertian di atas, dan jika kita kaitkan dengan kebijakan pemerintah Kota Sawahlunto dalam penelitian ini, maka dapat kita simpulkan bahwa kebijakan pemerintah Kota Sawahlunto merupakan serangkaian upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sawahlunto yang berdasarkan perencanaan dalam rangka pengembangan pariwisata khususnya pada resort kandi beserta konsekuensi akibat keputusan tersebut.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui

formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Riant Nugroho D.:2004:158).

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain (Riant Nugroho D.:2004:159).

Dalam sebuah rangkaian implementasi kebijakan memiliki urutan-urutan yang harus ada, jika kita lihat dari segi manajemen pemerintahan secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut; pertama diawali dengan adanya penetapan tujuan, baik jangka panjang maupun untuk jangka pendek, yang sering disebut dengan visi dan misi, setelah itu ada perencanaan yang dalam istilah dalam manajemen pemerintahan disebut dengan Rencana Strategi (Renstra), penyusunan Program dan kegiatan berupa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang mengacu pada Renstra yang telah ada, dan setelah pelaksanaan kegiatan maka perlu dievaluasi dalam rangka perbaikan kebijakan dimasa yang akan datang.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa tujuan dari sebuah kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan intervensi itu sendiri, dan inti permasalahan dalam implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia (Riant Nugroho D. : 2004 : 161,164).

Riant Nugroho D. dalam bukunya yang berjudul "Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi", menjelaskan bahwa ada dua pemilahan model

implementasi kebijakan. Yang pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” (top-bottom) versus “dari bawah ke atas” (bottom-top), dan pemilahan yang kedua adalah implementasi yang berpola paksa (command-and-control) dan mekanisme pasar (economic incentive).

Model mekanisme paksa adalah model yang mengedepankan arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa di dalam Negara di mana tidak ada mekanisme insentif bagi yang menjalankannya, namun ada sanksi bagi yang menolak melaksanakan atau melanggarnya. Secara matematis model ini dapat disebut sebagai “zero-minus model”, di mana yang ada hanya nilai “nol” dan “minus” saja. Model mekanisme pasar adalah model yang mengedepankan mekanisme insentif bagi yang menjalankannya, dan bagi yang tidak menjalankan tidak mendapatkan sanksi, namun tidak mendapatkan insentif. Ada sanksi bagi yang menolak melaksanakan atau melanggarnya. Secara matematis model ini dapat disebut sebagai “zero-plus Model”, di mana yang ada hanya nilai “nol” dan “plus”. Di antaranya ada kebijakan yang memberikan insentif di satu kutub, dan memberikan sanksi di kutub lain. Model “top-down” mudahnya berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, di mana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya, “bottom-up” bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. Di antara kedua kutub ini ada interaksi pelaksanaan antara pemerintah dengan masyarakat.

Ada beberapa ahli yang mengkaji tentang model implementasi kebijakan seperti yang diuraikan oleh Riant Nugroho D. dalam bukunya yang berjudul

"Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi", diantaranya adalah Donald Van Meter dan Carl Van Horn, yang mengandaikan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimaksudkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu : (1) aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, (2) karakteristik dari agen pelaksana/implementor, (3) kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan (4) kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor.

Selanjutnya model "kerangka analisis implementasi" yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, dimana mereka mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel yaitu : (1) variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki, (2) variable internevening; yaitu variable kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, (3) variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar (Riant Nugroho D.:2004:169).

Para Ahli lain yang menjelaskan tentang model implementasi kebijakan yaitu Ricard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern & David O'Porter (1981). Mereka lebih menekankan model "Bottom-up" dan model "mekanisme

pasar". Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlihat di dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka : tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran bawah (Riant Nugroho D.: 2004:177).

Melihat dari uraian di atas, dimana secara prinsip terdapat dua model implementasi kebijakan yaitu model "Top-Down" dan model "Bottom-Up". Jika kita melihat pada sistem pemerintahan di Indonesia kedua model tersebut telah dilaksanakan yaitu pada zaman Orde Baru yang menggunakan metode "Top-down" dan "Mekanisme Paksa", dimana pelaksanaan roda pemerintahan yang sentralistik sangat kental terlihat, dan hal tersebut berjalan selama 32 tahun sampai munculnya "Orde Reformasi" yang cenderung menggunakan metode "Bottom-Up" dan "Mekanisme Pasar", yang lebih mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Kedua metode tersebut tentunya memiliki nilai positif dan negatifnya, dan tidak ada metode yang terbaik diantara keduanya. Kadangkala perlu menggunakan metode "top-down" dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, seperti dalam penanganan terorisme, dan kebijakan lainnya yang bersifat sangat strategis dan berhubungan dengan keselamatan Negara. Namun ada implementasi kebijakan yang semestinya menggunakan metode "bottom-up", seperti perencanaan pembangunan dan lain-lainnya yang tentunya tidak berhubungan langsung dengan keselamatan Negara.

Dalam memilih metode mana yang akan digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana implementasi kebijakan tersebut dapat menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri, dengan memenuhi “empat tepat” yaitu : (1) tepat kebijakan, (2) tepat pelaksanaan, (3) tepat target atau sasaran, dan (4) tepat lingkungan. Dan keempat “tepat” tersebut masih harus didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategik, dan dukungan teknis (Riant Nugroho D.:2004:179-181).

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Pariwisata.

Pengertian pariwisata menurut UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah sebagai berikut :

“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.

Sementara itu kepariwisataan sendiri menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah sebagai berikut :

“Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha” .

Dalam pengembangan kepariwisataan pemerintah daerah memiliki beberapa kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2009 dimana terdapat 11 kewenangan diantaranya : (1) menyusun dan menetapkan rencana induk

pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota, (2) menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota, (3) menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota, (4) melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, (5) mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya, (6) memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya, (7) memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru, (8) menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota, (9) memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya, (10) menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan (11) mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pembangunan kawasan wisata pada dasarnya merupakan pengembangan komponen-komponen pariwisata, yang pada pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan secara gradual dan paralel. Komponen tersebut tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi kegiatan pariwisata, tetapi merupakan rangkaian dari berbagai faktor lain seperti kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, potensi yang dimiliki, potensi alam, potensi buatan, ketersediaan sumberdaya manusia tenaga kerja dan tenaga ahli serta koordinasi antara berbagai instansi terkait (Gunn, 1988: 74-76).

Dalam pelaksanaan pengembangan kepariwisataan tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Pengembangan pariwisata harus diikuti dengan memanfaatkan peluang-peluangnya sebagai sumber pendapatan masyarakat setempat dan pendapatan daerah secara keseluruhan.

Objek wisata Resort Kandi Kota Sawahlunto, merupakan salah satu objek wisata alam terbuka (sering disebut ekowisata) yang ada di Kota Sawahlunto, yang saat ini memiliki 3 (tiga) buah danau yaitu danau Kandi, Danau Tanah Hitam, dan Danau Tandikek, danau tersebut merupakan bekas galian tambang batubara. Wisata alam atau sering juga disebut ekowisata memiliki potensi yang cukup besar dalam menarik perhatian para wisatawan, yang tentunya diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengembangannya sehingga lokasi tersebut benar-benar dapat menarik wisatawan secara optimal.

Ekowisata (biasa diterjemahkan dengan wisata alam, yang sebetulnya kurang tepat) adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan jasa lingkungan, baik itu alam (keindahannya, keunikannya) ataupun masyarakat (budayanya, cara hidupnya, struktur sosialnya) dengan mengemukakan unsur-unsur konservasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat setempat (Fandlei,et.al,2000).

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (KLH) mendefinisikan ekowisata sebagai berikut :

“Wisata dalam bentuk perjalanan ke tempat-tempat di alam terbuka yang relatif belum terjamah atau tercemar dengan khusus untuk mempelajari, mengagumi, dan menikmati pemandangan dengan tumbuhan serta satwa liarnya termasuk potensi kawasan ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis tumbuhan dan satwa liar) juga semua manifestasi kebudayaan yang ada (termasuk tatanan lingkungan sosial budaya) baik dari masa lampau maupun masa kini di tempat-tempat tersebut dengan tujuan untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat”.

perencanaan pengembangan ekowisata harus didasarkan pada regulasi secara nasional maupun kesepakatan secara internasional. Seluruh regulasi dan kesepakatan internasional dijadikan dasar dan landasan untuk pengembangan

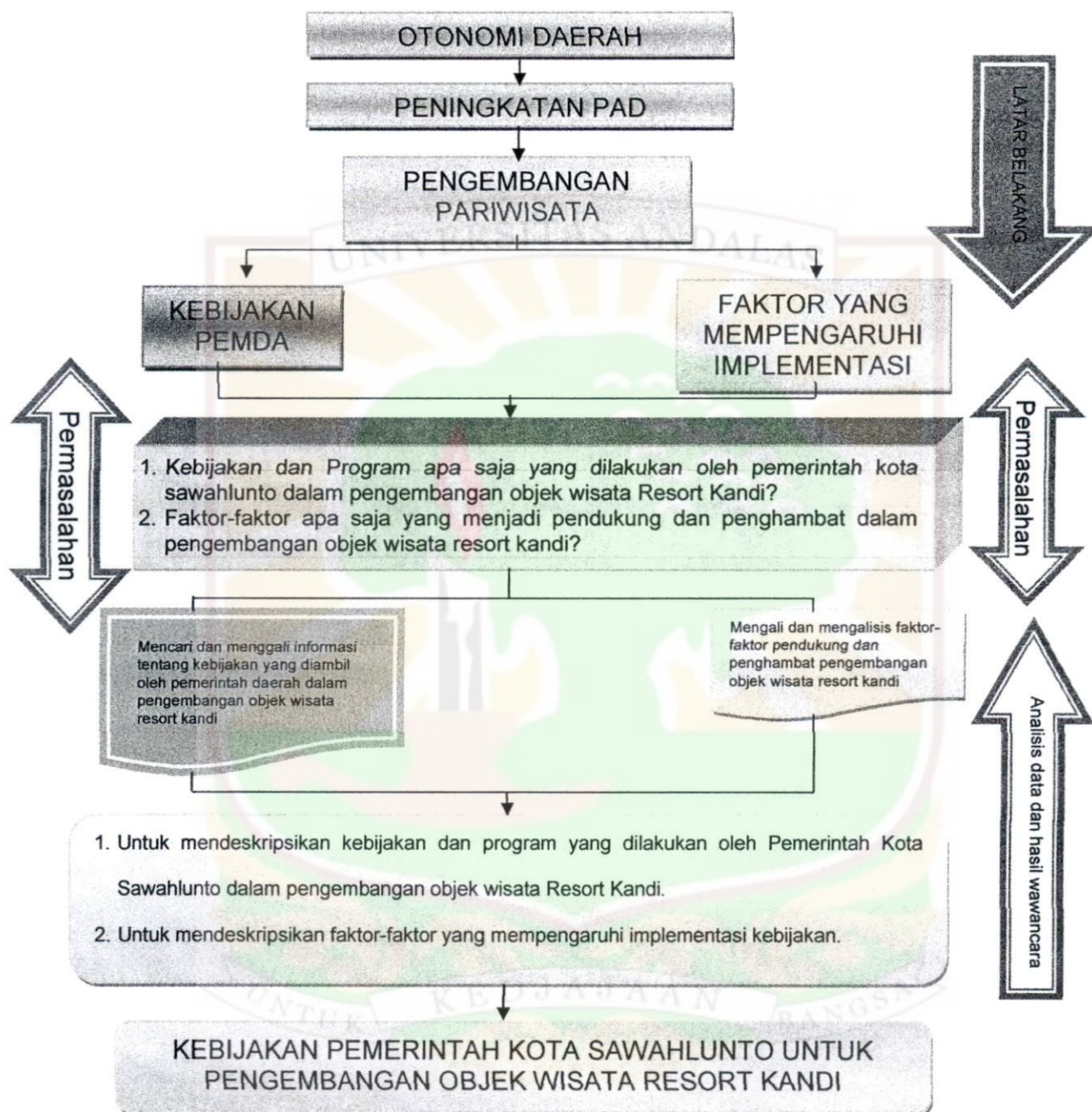
ekowisata nasional. Sementara pengembangan ekowisata regional atau lokal didasarkan pada regulasi di daerah serta persepsi dan preferensi masyarakat sebagai bentuk realisasi paradigma baru yang memberdayakan rakyat. Dalam perencanaan pengembangan ekowisata tujuan yang ingin dicapai adalah kelestarian alam dan budaya serta kesejahteraan masyarakat. Sementara pemanfaatan hanya dilakukan terhadap aspek jasa estetika, pengetahuan (pendidikan dan penelitian) terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati filosofi, pemanfaatan lajur untuk tracking dan adventure.

Choy (1997) dalam Fandle, et.al (2000) menjelaskan bahwa ada lima aspek utama berkembangnya ekowisata yaitu : (1) adanya keaslian alam dan budaya (2) keberadaan dan dukungan masyarakat (3) pendidikan dan pengalaman (4) keberlanjutan dan (5) kemampuan manajemen pengelolaan ekowisata.

Untuk melihat faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan pariwisata Yang sangat penting dikenali adalah keadaan (keindahan, daya tarik) yang spesifik atau unik dan obyek wisata yang bersangkutan. Selanjutnya prasarana apa yang tersedia ; lancar/tidak lancar, nyaman/,tidak nyaman, sudah lengkap/masih harus diadakan atau dilengkapi dan sebagainya. Tersedianya sumberdaya manusia yang terlatih maupun yang dapat dilatih, berhubungan dengan tingkat pendidikan dan budaya masyarakatnya (Fandlei, et.al, (2000).

Lundberg et.al (1997) menjelaskan bahwa proyek-proyek kepariwisataan harus dilaksanakan setelah ditentukan tujuan dan sasaran-sasaran strategis. Suatu strategi adalah suatu rencana yang direkayasa untuk menyelesaikan suatu misi.

4. Kerangka Pikir.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini telah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan karena saya ingin mengungkapkan proses pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto, khususnya dalam pengembangan pariwisata resort kandi di Kota Sawahlunto.

Dalam penelitian ini saya bertindak sebagai instrumen penelitian. Dengan saya sebagai instrumen penelitian tentunya mempermudah penyesuaian-penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Kirk dan Miller (Moleong, 2000:3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Sedangkan menurut Alston (1998),

"Qualitative researchers are more interested in understanding how others experience life, in interpreting meaning and social phenomena, and in exploring new concepts and developing new theories".

(peneliti kualitatif lebih tertarik untuk memahami tentang pengalaman hidup dari orang-orang, dalam meginterpretasikan arti dan fenomena sosial, serta dalam mendalami konsep-konsep baru dan membuat teori baru).

Dalam metode penelitian kualitatif, data diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan dengan meneliti obyek kajian dan mengadakan interaksi langsung dengan Pemerintah Daerah dalam Hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota sawahlunto serta masyarakat setempat dan telah mendapatkan informasi yang

mendalam mengenai proses pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Sawahlunto dalam pengembangan pariwisata resort kandi termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi. Hal ini berdasarkan tujuan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2000:3). Sedangkan menurut Nawawi dan Martini (1992:211) ciri dari salah satu penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, dimana data yang ditampilkan umumnya berbentuk uraian dan kalimat-kalimat yang merupakan gambaran faktual dan akurat, serta hubungan antar masalah yang diteliti.

Pemilihan metode penelitian ini untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang proses pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata resort kandi di Kota Sawahlunto. Melalui metode penelitian ini saya dapat mendeskripsikan jawaban secara obyektif dan seakurat mungkin mengenai kebijakan yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata.

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menggambarkan secara mendalam berdasarkan dukungan fakta dan informasi yang ada tentang proses pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata resort kandi di Kota Sawahlunto, maka yang dipergunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Melalui metode deskriptif ini tujuan yang telah saya peroleh adalah dapat mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena di dalam pengembangan pariwisata.

Berkaitan dengan metode penelitian deskriptif, Neuman (1997:19) mengemukakan :

"Descriptive research present a picture of the specific situation, social setting, or relationship. Much of social research found in scholarly journals or used for making policy decision is descriptive".

(Penelitian deskriptif menyajikan suatu gambaran dari suatu keadaan, latar belakang sosial serta hubungan sosial. Penelitian sosial yang banyak ditemukan pada jurnal-jurnal pendidikan atau digunakan untuk menyusun suatu kebijakan menggunakan metode deskriptif).

Dalam pengertian lain, Nazir (1999:63) mengemukakan metode penelitian deskriptif sebagai berikut, yaitu :

"Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki".

Penelitian deskriptif digunakan untuk menjawab apa dan memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai suatu gejala sosial sebagaimana yang dimaksudkan dalam suatu permasalahan penelitian yang ingin diteliti (Malo, 1986:28). Dengan demikian, dalam penelitian ini harus mampu menggambarkan secara lebih terperinci kondisi atau peristiwa yang terjadi di suatu lokasi dan pada suatu masyarakat berdasarkan fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang dilihat di lapangan dalam hal ini adalah gambaran tentang proses pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata resort kandi di Kota Sawahlunto.

B. Sumber Data

Menurut Lofland (Moleong, 2000:84-108), sumber data dalam penelitian kualitatif adalah : "Kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain". Dengan demikian data penelitian ini penulis peroleh dari hasil wawancara dengan para informan dan didukung dokumen berupa naskah-naskah dan data tertulis. Sumber data tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu ; (1) pihak Pemerintah Daerah, (2) pihak masyarakat disekitar wilayah lokasi penelitian.

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dalam penelitian ini saya telah memilih orang-orang (informan) yang dapat memberikan informasi tersebut. Dan informan yang saya pilih adalah yang mengetahui situasi dan kondisi masalah penelitian baik yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan proses pengembangan pariwisata.

Informan sebagaimana yang dimaksudkan di atas ditentukan secara *purposive sampling*, dimana informan sengaja dipilih oleh peneliti berdasarkan pemikiran yang logis dan sesuai dengan informasi yang dicari dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Agar informasi yang diperoleh dapat lebih akurat dan faktual maka informan yang dimaksud adalah yang mengetahui dan memahami sepenuhnya mengenai obyek kajian yang diteliti (Malo, 1986:103).

Untuk itu, dalam menetapkan siapa yang menjadi nara sumber di lapangan sudah ditetapkan sejak awal sesuai dengan kajian penelitian ini. Informan yang dipilih adalah mereka yang mewakili unsur yang berhubungan langsung atau tidak

langsung dengan pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Sawahlunto, seperti :

1. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto, untuk memperoleh informasi tentang Latar belakang kebijakan dan gambaran umum program, sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan/program, faktor pendukung dan kendala yang dihadapi.
2. Kepala Bidang Program Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Sawahlunto, dan Kepala UPTD Kandi untuk memperoleh informasi tentang pemahaman kebijakan program, sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan/program, kesiapan pelaksana, faktor pendukung dan kendala yang dihadapi.
3. Camat Talawi, dan Kepala Desa Kolok Mudiak, untuk memperoleh informasi tentang pemahaman kebijakan program, realisasi program bagi masyarakat, faktor pendukung dan kendala yang dihadapi.
4. Masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat), untuk memperoleh informasi tentang Pemahaman kebijakan program, dampak dari kebijakan/program, faktor pendukung dan kendala yang dihadapi.

Tabel 3.1 : Jenis Informan dan Data yang Dibutuhkan

Informasi yang ingin diperoleh	Informan	Jumlah
Latar belakang kebijakan dan gambaran umum program, sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan/program, faktor pendukung serta kendala yang dihadapi dan upaya mengatasinya.	Aparat Pemerintah Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2 orang
Pemahaman kebijakan Program sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan/program, kesiapan pelaksana, faktor pendukung serta kendala yang dihadapi dan upaya mengatasinya	Kabid Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Kepala UPTD Kandi	2 orang
Pemahaman kebijakan program, sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan/program, realisasi program bagi masyarakat, faktor pendukung serta kendala yang dihadapi dan upaya mengatasinya	Camat dan Kepala Desa	2 orang
Pemahaman kebijakan program, sosialisasi dan pelaksanaan program, dampak kebijakan/program, faktor pendukung serta kendala yang dihadapi serta upaya mengatasinya	Masyarakat - Tokoh Masyarakat - Tokoh Agama - Tokoh adat	1 orang 1 orang 3 orang
Jumlah		11 orang

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang telah saya gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam

Saya mengawali penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka secara langsung kepada informan. Saya mendapatkan jawaban dan penjelasan sesuai dengan hal-hal yang berhubungan dengan

permasalahan penelitian. Wawancara mendalam ini saya lakukan dengan mendatangi informan ke kantor atau tempat kerja, seperti Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto, Kantor Camat, Kantor Desa, dan Kantor UPTD Kandi, dalam rentang waktu dari bulan April s/d Mei 2010.

2. Observasi/ Pengamatan

Pengamatan langsung dilakukan penulis di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan di lapangan atau informasi yang diperoleh dari informan, sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Hal-hal yang diobservasi lebih difokuskan pada proses pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata, faktor pendukung dan penghambat serta usaha untuk mengatasi hambatan tersebut.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi. Menurut Moleong (2000:103), analisis data adalah :

"Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Dengan demikian, data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan studi kepustakaan atau dokumentasi akan dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan langsung hasil wawancara".

Sedangkan tahap-tahap analisa data dalam penelitian ini, menurut Sarantakos (Alston dan Bowles, 1998:195) tahap-tahap tersebut terdiri dari tiga

tahap umum, yaitu: *data reduction*, *data organization*, dan *interpretation*, yang secara spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Data reduction* (reduksi data), pada tahap ini data diberi kode, disimpulkan dan dikategorikan menurut aspek-aspek penting dari setiap isu yang telah diteliti. Dengan tahap ini akan membantu juga dalam menentukan data apa yang diperlukan dan bagaimana serta siapa yang akan memberikan informasi selanjutnya, metode apa yang digunakan untuk menganalisis yang akhirnya akan membawa pada kesimpulan.
2. *Data organization* (pengorganisasian data), pada tahap ini adalah tahap proses pengumpulan (*assembling*) informasi yang betul-betul penting dan dianggap merupakan tema atau pusat penelitian. Pada tahap ini data-data yang hampir sama atau mirip digabungkan dalam kategori tertentu untuk dijadikan dalam bentuk satu permasalahan saja.
3. *Interpretation* (interpretasi atau penafsiran), tahap ini meliputi proses mengidentifikasi pola-pola (*patterns*), kecenderungan (*trends*), dan penjelasan (*explanations*) yang akan membawa kepada kesimpulan yang telah teruji melalui data yang benar-benar lengkap dan tidak ada informasi atau pengertian baru yang terlewatkan.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sawahlunto. Lokasi ini dipilih karena saya sendiri adalah salah seorang warga Kota Sawahlunto, dan

berdomisili di Kota Sawahlunto, serta karena potensi alam yang dimiliki oleh Kota Sawahlunto berbeda dengan kota-kota lain yang ada di Sumatera Barat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 2 (dua) bulan yakni selama bulan April s/d Mei 2010.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Geografis

Secara Geografis Kota Sawahlunto terletak antara $0,34^{\circ}$ – $0,46^{\circ}$ Lintang Selatan dan $100,41^{\circ}$ – $100,49^{\circ}$ Bujur Timur. Dengan topografi yang beragam karena berada di daerah perbukitan diantara jajaran Bukit Barisan dengan elevasi/ketinggian 262 meter (paling rendah 250 meter – paling tinggi 650 meter) diatas permukaan laut, temperatur udara berkisar antara 22°C – 33°C . (LKPJ Kota Sawahlunto Tahunn 2009).

Secara Administratif Kota Sawahlunto pada awalnya terdiri dari 2 (dua) Kecamatan, yaitu; Kecamatan Sawahlunto Utara dan Kecamatan Sawahlunto Selatan dengan luas 5.777 Km² atau 577,7 Ha. Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok, maka Kota Sawahlunto dimekarkan menjadi 4 (empat) Kecamatan yang terdiri dari; Kecamatan Silungkang dengan luas 32,93 Km², Kecamatan Lembah Segar 52,58 Km², Kecamatan Barangin 88,55 Km², Kecamatan Talawi 88,39 Km². (Sawahlunto Dalam Angka 2009). Keempat Kecamatan tersebut terdiri dari 20 (dua puluh) Kelurahan dan 31 (tiga puluh satu) Desa, dengan luas keseluruhan Kota Sawahlunto menjadi 273.45 Km² atau 27.345 Ha. Akibat dari Perluasan Daerah tersebut maka administrasi pemerintahan terendah di Kota Sawahlunto terdiri dari Pemerintahan Kelurahan yang merupakan wilayah Kota Sawahlunto

pada awalnya, dan juga Pemerintahan Desa yang merupakan wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok.

Kemudian berdasarkan keputusan Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Sumatera Barat Nomor 140-119-1999 tanggal 19 April 1999 tentang penetapan wilayah Administrasi Pemerintahan Kelurahan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto dilakukan penggabungan Kelurahan, sehingga yang semula berjumlah 20 Kelurahan menjadi 10 Kelurahan. Desa yang semula berjumlah 31 Desa berubah menjadi 27 Desa.

Dari beberapa kali perubahan tersebut saat ini Kota Sawahlunto terdiri dari empat kecamatan yakni Kecamatan Silungkang, Lembah Segar, Barangin dan Talawi. Dan pada Kecamatan Silungkang terdapat lima Desa yang terdiri dari Desa Silungkang Oso, Silungkang Duo, Silungkang Tigo, Muaro Kalaban dan Taratak Bancha. Sementara itu Kecamatan Lembah Segar terdiri dari lima Desa dan enam Kelurahan yaitu Desa Lunto Barat, Lunto Timur, Pasar Kubang, Kubang Tengah dan Kubang Utara Sikabu, Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan, Kubang Sirakuk Utara, Pasar, Aur Mulyo, Tanah Lapang dan Air Dingin.

Tidak jauh berbeda dengan Kecamatan Lembah Segar, Kecamatan Barangin terdiri dari empat Kelurahan dan enam Desa yaitu Kelurahan Saringan, Lubang panjang, Durian I dan Durian II, Desa Santur, Kolok nan Tuo, Kolok Mudiak, Lumindai, Balai batu sandaran dan Desa Talago Gunuang. Dan Kecamatan Talawi terdiri dari 11 Desa yakni Desa Sikalang, Sijantang Koto, Salak, Talawi Mudiak, Talawi Hilir, Tumpuak Tengah, Batu Tanjuang, Datar mansiang, Bukik Gadang, Kumbayau, Rantiah.

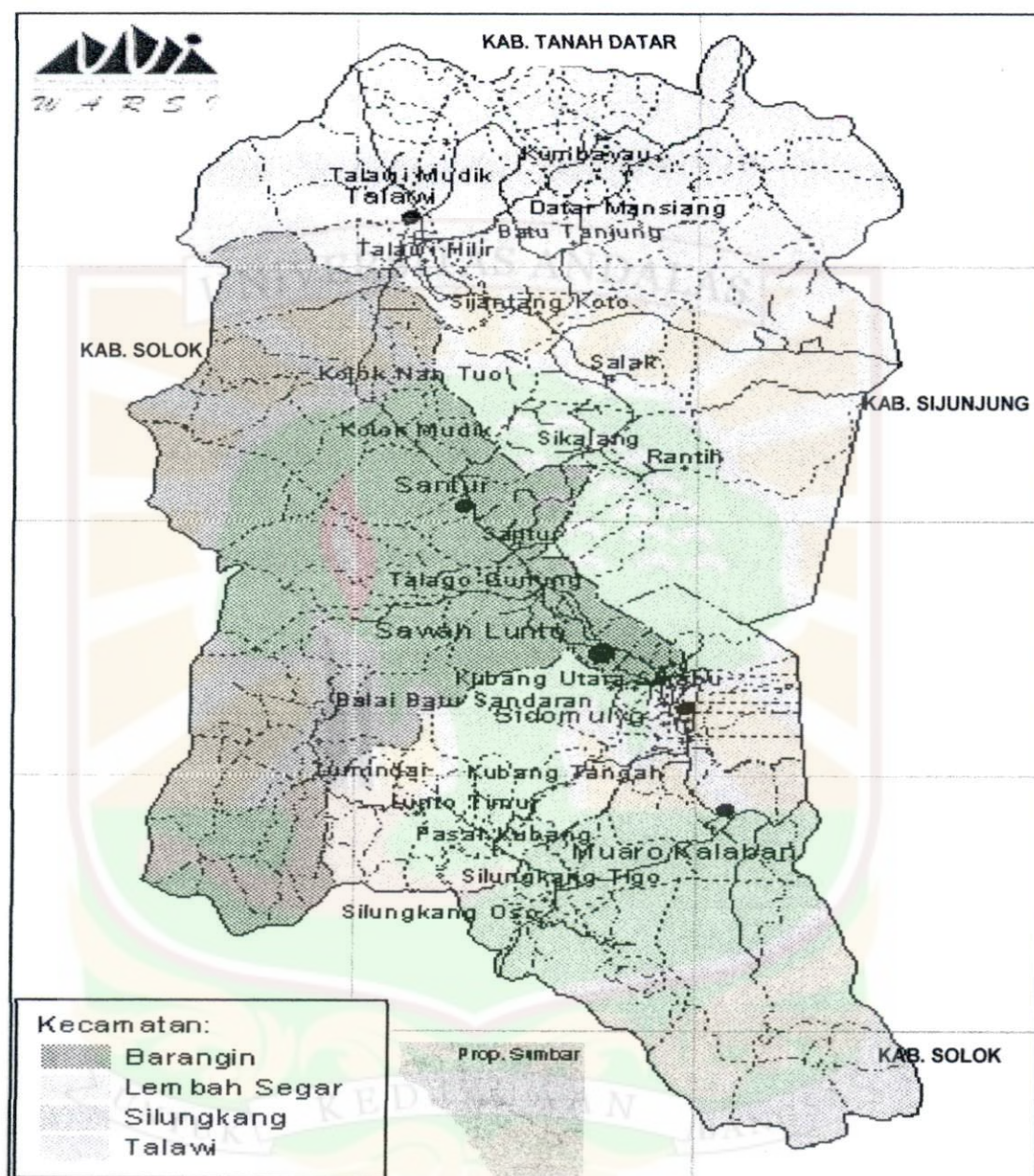
Pada wilayah administrasi Kota Sawahlunto saat ini terdapat sepuluh kenagarian yang diakui secara adat oleh pemerintah kota, namun tidak mempunyai hak atau kewenangan dibidang administrasi Pemerintahan, dengan kata lain bahwa di Kota Sawahlunto tidak terdapat Pemerintahan Nagari, namun kenagarian yang ada tetap diakui dan dalam pemerintahan Nagari diwadahi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dipimpin oleh seorang Ketua KAN pada masing-masing nagari yang ada. Nagari tersebut antara lain, Nagari Silungkang, Tak Boncah, Kubang, Lunto, Lumindai, Kajai, Talago Gunuang, Kolok, Sijantang, dan KAN Talawi.

Ke sepuluh kenagarian yang ada di Kota Sawahlunto tersebut, tersebar pada ke empat Kecamatan yang terdiri dari, pertama, Kecamatan Silungkang terdiri dari Kenagarian Silungkang dan Tak Boncah, kedua Kecamatan Lembah Segar terdiri dari Kenagarian Kubang dan Lunto, ketiga Kecamatan Barangin terdiri dari Kenagarian Lumindai, Kajai, Talago Gunuang, Kolok, keempat Kecamatan Talawi terdiri dari Kenagarian Talawi dan Kenagarian Sijantang.

Adapun Wilayah Administrasi Kota Sawahlunto dapat dilihat pada gambar peta berikut :



Gambar 1. Peta Administrasi Kota Sawahlunto



Sumber data : LKPJ Kota Sawahlunto tahun 2009.

2. Demografis

Jumlah penduduk Kota Sawahlunto berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2008 adalah sebanyak 54.913 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 27.045 jiwa dan perempuan sebanyak 27.868 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2007 yang jumlahnya 53.686 jiwa, telah terjadi kenaikan jumlah penduduk Kota Sawahlunto sebesar 1,02 %. (sumber: LKPJ Kota Sawahlunto Tahun 2009)

Selanjutnya kalau penduduk Kota Sawahlunto dilihat dari lapangan pekerjaannya, maka penduduk Kota Sawahlunto yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 21,91%, pertambangan sebanyak 8,59%, industri sebanyak 10,89%, listrik, gas dan air minum sebanyak 0,99%, konstruksi sebanyak 8,53%, perdagangan sebanyak 17,79%, Angkutan dan Komunikasi sebanyak 6,16%, Keuangan sebanyak 1,77% dan jasa sebanyak 23,37% sedangkan sisanya bekerja pada bidang lainnya (Sumber : LKPJ Kota Sawahlunto 2009).

Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2008 sebesar 200,82 jiwa/Km² dan diurai menurut Kecamatan, sebagai berikut; Kecamatan Silungkang penduduknya 9.484 jiwa dengan kepadatan 288,01 jiwa/km², Kecamatan Lembah Segar 12.034 jiwa dengan kepadatan 228,87 jiwa/km², Kecamatan Barangin 16.158 jiwa dengan kepadatan 182,47 jiwa/km² dan Kecamatan Talawi 17.237 dengan kepadatan 173.43 jiwa/km². (Sumber: BPS Kota Sawahlunto dan Sawahlunto Dalam Angka 2008-2009).

3. Gambaran Umum Resort Kandi

Resort Kandi berjarak \pm 12 Km dari Pusat Kota Sawahlunto dan terletak pada bagian utara dari Pusat Kota (Kota Lama) dan dilalui oleh Jalan Propinsi dan Jalan Kota (lokasi strategis). Secara geografis Wilayah Resort Kandi

terletak 00° 36' 44" – 0° 38' 32,46" Lintang Selatan dan 100° 44' 30.12" – 100° 45' 42,03" Bujur Timur.

Secara administrasi Wilayah Resort Kandi merupakan bagian dari lima Desa yang termasuk dalam Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi. Lebih rinci mengenai Desa yang termasuk dalam Wilayah Resort Kandi dan Luas Wilayah Resort Kandi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.1. Luas Wilayah Resort kandi

No	Desa	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	
			Administrasi	Kandi
1	Kolok Nan Tuo	Barangin	1,676.00	101.60
2	Kolok Mudiak	Batangin	852.00	71,15
3	Sikalang	Talawi	659.00	77.67
4	Salak	Talawi	660.00	57.73
5	Sijantang Koto	Talawi	640.00	85.25
	Jumlah		4,487.00	393,45

Sumber : Kecamatan dalam Angka dan Bag. Tapem Tahun 2010

Kawasan Kandi, saat ini merupakan salah satu obyek wisata yang sedang dikembangkan di Kota Sawahlunto dengan luas 393,45 Ha, perjalanan menuju daerah wisata ini bisa ditempuh 15 menit dari pusat Kota Sawahlunto dan ± 2,5 jam dari Padang.

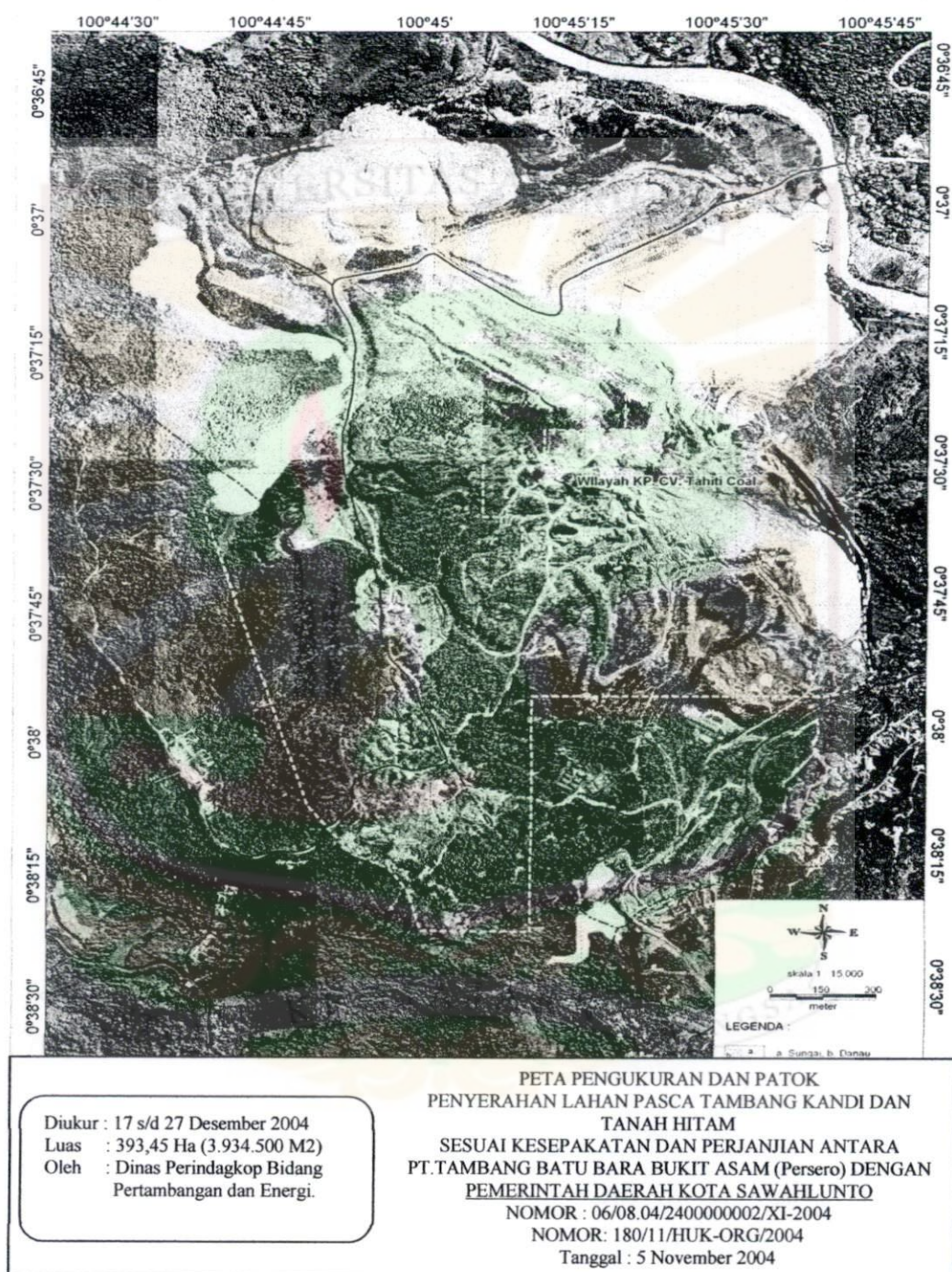
Pada Daerah Resort Kandi terdapat 4 ruas jalan yang menghubungkan kawasan kandi dengan jalan propinsi dan jalan kota. Dari 4 ruas jalan ini baru satu ruas yang permanen dengan badan jalan di aspal sepanjang 2.4 KM. Akses ke dalam kawasan ini umumnya masih belum memadai sedangkan fasilitas pendukung untuk layaknya sebuah daerah tujuan wisata masih belum

lengkap. Untuk itu pada kawasan ini perlu dibenahi penataan ruang, bangunan dan lingkungan serta sarana dan prasarana penunjuang.

Karena Kawasan Kandi merupakan salah satu Objek wisata yang baru dikembangkan, maka saat ini belum merupakan salah satu objek tujuan utama wisatawan terutama wisatawan mancanegara. Kondisi ini menyebabkan kawasan wisata Kandi belum berkembang jika dibandingkan dengan kawasan wisata di kota/kabupaten lainnya di Sumatera Barat. Sementara itu dilihat dari objek wisatanya, Kawasan Wisata Resort Kandi merupakan kawasan yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Untuk melihat gambaran lokasi Kawasan Wisata Resort Kandi dapat dilihat pada gambar peta berikut :



Gambar.2 : Peta Tanah Pasca Tambang Terbuka PT.BA (Persero) TBK – UPO yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Sawahlunto (kawasan kandi).



Sumber : Bagian Tapem Setdako Sawahlunto tahun 2010.

Secara Topografi wilayah Resort Kandi terletak pada ketinggian berkisar antara 210 – 370 m diatas permukaan laut dengan pola Topografi dominan (80%) berbukit dan bergelombang yang sebagian besar berlokasi di bagian tengah Wilayah Resort Kandi. Sedangkan sisanya (20 %) berupa dataran, dimana letaknya sebagian besar berlokasi di pinggir Jalan Propinsi dan pada areal bekas Tambang Terbuka Kandi dan Tanah Hitam.

4. Perekonomian

Secara garis besar ada 4 (empat) potensi unggulan Kota Sawahlunto yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, Pertama, Bidang Pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan serta peternakan merupakan salah satu potensi unggulan Kota Sawahlunto.

Dari segi penggunaan tanah 31,74 % dari wilayah kota dimanfaatkan untuk pertanian disamping masih adanya tanah kosong yang masih memungkinkan untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. Pada tahun 2008, sektor pertanian mengalami angka pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2007. Tahun 2007 lalu pertumbuhan sektor ini sebesar 5,55 persen, pada tahun 2008 mencapai 7,87 persen. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi pada sub sektor tanaman pangan & hortikultura yang naik dari 2,69 persen menjadi 9,50 persen. Namun demikian, ada pula sub sektor pendukung lainnya yang mengalami penurunan angka pertumbuhan, yaitu sub sektor perkebunan dari 13,69 persen menjadi 8,22 persen; sub sektor peternakan dari 9,45 persen menjadi 5,32

persen dan sub sektor perikanan dari 8,38 persen menjadi 4,58 persen (sumber: LKPJ Kota Sawahlunto Tahun 2009).

Apabila dilihat dari PDRB Kota Sawahlunto pada 2008, dimana total PDRB atas dasar harga berlaku termasuk batubara adalah sebesar Rp. 855.364,32 juta. Dan kontribusi dari sektor pertanian adalah sebesar Rp. 73.960,55 juta atau 8,65 % dari total PDRB Kota Sawahlunto (sumber: PDRB Kota Sawahlunto 2007-2008).

Kedua Bidang Perindustrian, angka pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2007 terhitung 3,19 persen dan pada tahun 2008 angka pertumbuhannya melemah menjadi -2,2 persen. Industri kecil di Kota Sawahlunto banyak bergerak di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan daripada industri logam, mesin, elektronika dan aneka. Dengan demikian kondisi ini menunjukkan bahwa industri di Kota Sawahlunto telah berbasis kepada sumber daya alam dan potensi ekonomi lainnya yang dimiliki oleh penduduk kota (sumber : LKPJ Kota Sawahlunto Tahun 2009).

Dilihat dari PDRB Kota Sawahlunto pada 2008, dimana total PDRB atas dasar harga berlaku termasuk batubara adalah sebesar Rp. 855.364,32 juta, dan kontribusi dari sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Sawahlunto adalah sebesar Rp 88.058,31 juta atau sebesar 10,29% dari total PDRB kota Sawahlunto (sumber: PDRB Kota Sawahlunto 2007-2008).

Ketiga Bidang Pariwisata, Kota Sawahlunto mempunyai banyak potensi alam maupun budaya untuk dikemas menjadi produk wisata. Rencana pengembangan daya tarik wisata diawali dari Kota Lama Sawahlunto, karena kawasan ini dinilai memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi daya tarik wisatawan. Di kawasan ini terdapat beberapa situs yang dapat dikembangkan

menjadi objek wisata antara lain lobang bekas penambangan, instalasi pemrosesan batubara, sarana dan prasarana pengangkutan batubara dan bangunan tua peninggalan Belanda dengan arsitektur yang unik.

Namun apabila dibandingkan tahun sebelumnya sektor pariwisata terjadi penurunan dimana pada tahun 2007 angka pertumbuhannya adalah sebesar 5,08 persen, menjadi 4,78 persen di tahun 2008. Penyumbang terbesar turunnya angka pertumbuhan sektor jasa-jasa disebabkan karena negatifnya angka pertumbuhan pada sub sektor jasa hiburan dan rekreasi, yaitu menjadi -2,78 persen di tahun 2008, penyebabnya adalah menurun drastisnya pemasukan daerah dari hasil penjualan tiket kunjungan wisatawan ke tempat rekreasi Waterboom yang menjadi andalan Kota Sawahlunto (sumber: LKPJ Kota Sawahlunto Tahun 2009).

Keempat Bidang Pertambangan, khususnya tambang batubara masih berpotensi untuk menggerakkan ekonomi Kota Sawahlunto terutama untuk tambang bawah tanah untuk itu Pemerintah Kota tetap mendorong dan memfasilitasi agar tambang dalam tetap dilaksanakan. Sedangkan untuk tambang terbuka memang masih memproduksi tetapi dalam kapasitas yang kecil.

Kontribusi pertambangan dan penggalian ini terhadap PDRB Kota Sawahlunto mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2008, dimana pada tahun 2007 angka pertumbuhannya adalah -6,57 persen, kemudian di tahun 2008 meningkat menjadi 1,36 persen. Peningkatan ini sangat berhubungan dengan meningkatnya pertumbuhan sub sektor non migas (produksi batubara) yang kontribusinya sekitar seperlima bagian dari nilai tambah PDRB Kota Sawahlunto, sehingga andilnya pun sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto secara umum. Selama tahun 2007 angka

pertumbuhan sub sektor ini (batubara) sebesar -10,87 persen, dan di tahun 2008 pertumbuhannya meningkat menjadi 1,01 persen (sumber: PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2007-2008)..

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di Kota Sawahlunto dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam rentang waktu tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Untuk memperlihatkan pertumbuhan ekonomi secara riil, berikut ini akan dijelaskan peranan masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan Pendapatan Domestik Regional Bruto Kota Sawahlunto, seperti yang terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.2 : PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 Sampai Dengan Tahun 2008 termasuk Batu Bara(Jutaan Rupiah).

No	Lapangan Usaha	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian	46.145,44	52.322,17	61.724,97	73.960,55
2.	Pertambangan dan Penggalian	150.936,47	152.310,11	150.573,99	172.333,53
3.	Industri Pengolahan	74.640,30	82.686,68	89.735,52	88.058,31
4.	Listrik dan Air Bersih	5.845,81	6.834,25	8.706,38	9.360,47
5.	Bangunan	35.877,48	43.864,96	51.328,15	64.583,08
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	65.106,52	68.244,41	78.522,95	93.637,72
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	54.900,88	67.337,70	78.901,73	91.130,11
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	31.470,52	35.335,83	39.977,25	45.757,73
9.	Jasa-Jasa	154.620,34	168.570,59	189.750,95	216.542,83
PDRB		619.543,77	677.506,70	749.201,89	855.364,32

Sumber : PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2008

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga berlaku selama periode 2005-2008 mengalami peningkatan yang cukup berarti. Berdasarkan nilai PDRB pada tahun 2005 tercatat sebesar Rp 619.543,77 juta meningkat menjadi Rp 677.506,70 juta pada tahun 2006. Rp 749.221,89 juta pada tahun 2007 dan Rp 855.364,32 juta pada tahun 2008. Jika dilihat menurut sektor ekonomi, seluruh kegiatan perekonomian di Kota Sawahlunto menunjukkan adanya peningkatan yang cukup bervariasi. Sektor pertanian pada tahun 2005 sebesar Rp 46.145,44 juta menjadi Rp 73.960,55 juta pada tahun

2008. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2005 sebesar Rp 150.936,47 juta meningkat menjadi Rp 172.333,53 juta pada tahun 2008.

Kemudian sektor industri dan pengolahan selama periode 2005 – 2008 juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dimana pada tahun 2005 sebesar Rp. 74.640,30 juta meningkat menjadi Rp. 88.058,31 juta pada tahun 2008. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Sawahlunto adalah pada sektor Jasa-jasa/Service, dimana pada tahun tahun 2005 sebesar Rp. 154.620,34 juta meningkat menjadi Rp. 216.542,83 juta pada tahun 2008. Pada sektor ini didukung oleh perkembangan pariwisata yang ada di Kota Sawahlunto. Sementara itu untuk Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sawahlunto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2005 sampai tahun 2008 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:



Tabel 4.3 : PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 Sampai Dengan Tahun 2008 Termasuk Batu bara (Jutaan Rupiah).

No	Lapangan Usaha	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian	30.671,87	32.255,48	34.047,09	36.727,98
2.	Pertambangan dan Penggalian	117.392,99	106.298,03	99.313,72	100.668,64
3.	Industri Pengolahan	56.625,01	58.393,17	60.257,96	58.935,15
4.	Listrik dan Air Bersih	2.826,60	3.121,77	3.482,33	3.584,07
5.	Bangunan	22.798,47	25.051,62	26.368,37	27.878,59
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	43.247,86	43.882,84	46.147,76	48.614,04
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	35.896,77	38.341,03	40.162,72	42.080,74
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	23.103,74	24.431,30	25.416,02	26.396,20
9.	Jasa-Jasa	112.108,42	117.480,08	123.450,44	129.349,12
PDRB		444.671,74	449.255,32	458.646,42	474.234,54

Sumber : PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2008

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga konstan selama periode 2005-2008 mengalami peningkatan yang cukup berarti. Berdasarkan nilai PDRB pada tahun 2005 tercatat sebesar Rp 444.671,74 juta meningkat menjadi Rp 449.255,32 juta pada tahun 2006, Rp 458.646,42 juta pada tahun 2007 dan Rp 474.234,54 juta pada tahun 2008. Jika dilihat menurut sektor ekonomi, seluruh kegiatan perekonomian di Kota Sawahlunto menunjukkan adanya peningkatan yang cukup bervariasi. Sektor pertanian pada tahun 2005 sebesar Rp 30.671,87 juta menjadi Rp 36.727,98 juta pada tahun

2008. sedangkan sektor pertambangan dan penggalian juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2005 sebesar Rp 117.392,99 juta meningkat menjadi Rp 100.668,64 juta pada tahun 2008. Kemudian sektor industri dan pengolahan selama periode 2005 – 2008 juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik dimana pada tahun 2005 sebesar Rp 56.625,01 juta meningkat menjadi Rp 58.935,15 juta pada tahun 2008. Kontribusi terbesar untuk PDRB Kota Sawahlunto terletak pada sektor Jasa-Jasa, dimana pada tahun 2005 sebesar Rp 112.108,42 juta meningkat menjadi Rp 117.480,08 juta pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 meningkat menjadi sebesar Rp 123.450,44 juta dan pada tahun 2008 juga meningkat menjadi Rp 129.349,12 juta.

B. Kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto Untuk Pengembangan Objek Wisata Resort Kandi.

B.1. Kebijakan.

Kota Sawahlunto sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat mempunyai potensi yang cukup besar disektor pariwisata. Sesuai dengan Visi Kota Sawahlunto yaitu mewujudkan Kota Wisata Tambang yang Berbudaya 2020 melalui kegiatan penataan institusi, kerjasama antara daerah, meningkatkan fisik kota dan meningkatkan kualitas produk wisata. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah perencanaan penataan dan revitalisasi kawasan Kota Sawahlunto yang memiliki beberapa objek yang sangat menarik untuk dikembangkan sebagai salah satu tujuan objek wisata salah satunya adalah Kawasan Kandi. Kawasan ini memiliki keunikan sehingga berpotensi untuk dijadikan kawasan wisata karena pada lokasi ini terdapat sebuah danau yang terbentuk dari hasil penggalian tambang batu bara dan juga pada kawasan

ini terdapat tempat pacuan kuda yang terletak diatas bukit dan kawasan ini juga memiliki pemandangan yang sangat indah. Berbagai potensi objek wisata tersebut masih perlu untuk dikembangkan baik dari aspek tata ruang, investasi, informasi dan aspek lainnya yang terkait dengan perkembangan pariwisata daerah.

Pemerintah Kota Sawahlunto sangat berkeinginan untuk mengubah kawasan kandi yang merupakan kawasan bekas lokasi tambang menjadi kawasan wisata yang dapat menarik wisatawan baik lokal maupun manca negara. Pengembangan Wilayah Resort kandi ini berawal dari terbengkalainya wilayah tambang yang dulunya di eksploitasi oleh PT.BA UPO, dan disaat deposit batu baranya habis, tinggallah hamparan tanah yang terbuka dan gersang. Dari situ mulai dipikirkan oleh pemerintah Kota mau diapakan hamparan tanah gersang tersebut, maka setelah diadakan penelitian secara komprehensif, disepakati dan ditetapkanlah wilayah kandi dan tanah hitam menjadi objek wisata alam, dan diperkuat dengan adanya Surat Kesepakatan dan Perjanjian nomor : 06/08.04/2400000002/XI-2004 dan nomor : 180/11/Huk- Org/2004 tentang Penyerahan Lahan Pasca Tamka. Dalam surat kesepakatan dan perjanjian tersebut juga dituangkan bahwa penyerahan lahan tersebut disertai dengan dana reklamasi yang dibayarkan oleh PT.BA kepada Pemerintah Kota Sawahlunto sebesar Rp.1.283.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah), dan juga rencana pemanfaatan lahan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dengan memanfaatkan dana reklamasi yang diberikan, yaitu untuk pengembangan objek wisata resort kandi dan merubah tanah gersang tersebut menjadi objek wisata yang nantinya diharapkan menjadi salah satu ikon Kota Sawahlunto.

Dasar pengembangan kawasan kandi sebagai objek wisata adalah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Sawahlunto yang dibuat pada tahun 2002 dan Perda tentang RTRW Kota Sawahlunto tahun 2004-2014. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto sebagai berikut :

“Untuk menjadikan kawasan kandi menjadi kawasan wisata telah ditetapkan melalui Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Sawahlunto yang disusun pada tahun 2002 dan juga Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto 2004-2014, yang dijadikan acuan dalam pengembangan kepariwisataan di Kota Sawahlunto” (hasil wawancara pada tanggal 26 Mei 2010).

Untuk mengembangkan kawasan kandi menjadi kawasan wisata, pemerintah Kota Sawahlunto telah menyusun kebijakan. Pertama, Pemerintah Kota menyusun master plan kandi. Master plan ini merupakan acuan dalam pengembangan kawasan kandi. Secara detail tujuan penyusunan Master Plan Resort Kandi adalah (1) Sebagai dasar pedoman untuk penyusunan rencana pengembangan yang sifatnya operasional dan rinci dalam upaya pengembangan Resort Kandi secara mikro yang merupakan turunan dari Rencana Detail Tata Ruang (Blok Plan) Resort Kandi, dan (2) Sebagai dasar pengendali dan arahan pengembangan fisik (sarana dan prasarana) pendukung dan penunjang secara mikro.

Adapun sasaran yang diharapkan dari kegiatan penyusunan Master Plan Resort Kandi adalah sebagai berikut (1) Sebagai pedoman dan acuan pihak yang berkompeten untuk merealisasikan program pengembangan dan pembangunan Resort Kandi, (2) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pengembangan yang sifatnya implementatif, baik oleh instansi yang berfungsi untuk membina pengembangan olah raga, maupun instansi yang

memiliki peran dalam pengembangan sarana dan prasarana, dan (3) diharapkan dengan adanya master plan ini, berdasarkan tujuan yang akan dicapai, maka sasaran akhir yang akan dituju adalah terciptanya Resort Kandi yang akomodatif dan representatif (*aman, nyaman, bersih dan teratur*).

Penyusunan master plan diimplementasikan pada tahun 2003, dan dilakukan beberapa perubahan pada tahun 2005. Namun sampai saat penulis melakukan penelitian master plan tersebut belum di legal formalkan menjadi sebuah Peraturan Walikota (Perwako) maupun Peraturan Daerah (Perda). Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto sebagai berikut :

"Master Plan resort kandi sudah beberapa kali mengalami perubahan dan telah beberapa kali juga dilakukan ekspose di depan anggota DPRD dengan tujuan dapat dilegal formalkan atau dijadikan Perda tentang Master Plan Resort Kandi. Namun sampai saat ini masih belum dapat diperdakan. Salah satu alasan belum diperdakannya master plan resort kandi ini adalah karena masih adanya kemungkinan perubahan pengembangannya mengingat kawasan kandi tersebut merupakan kawasan yang cukup luas dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan atau alternatif pengembangannya". (hasil wawancara pada tanggal 26 Mei 2010).

Kebijakan yang kedua adalah membentuk Struktur pengelola kawasan kandi. Kebijakannya adalah untuk pengelolaan kawasan kandi dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kandi. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto sebagai berikut:

"Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan objek wisata di kawasan kandi maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kandi yang ditunjuk sebagai pelaksana di lapangan dan diharapkan dengan adanya UPTD Kandi ini adanya keseriusan dan lebih fokus dalam pengelolaan kawasan kandi."(hasil wawancara pada tanggal 26 Mei 2010).

Selain dari dua kebijakan di atas beberapa kebijakan lain yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah Kota Sawahlunto dalam pengembangan kawasan kandi adalah dengan Pertama Menciptakan citra Resort terpadu pada kawasan Kandi dan sekitarnya sebagai proyek strategis di sisi utara kota Sawahlunto, Kedua, mengembangkan kawasan Kandi dan sekitar sebagai bagian wilayah yang terpadu dengan wilayah lainya di Kota Sawahlunto namun memiliki identitas tersendiri diantara berbagai perkembangan pembangunan di kota Sawahlunto, ketiga, Memperkuat identitas kawasan melalui pengembangan fungsi dan rancang kota pada masing-masing jalur masuk kawasan, keempat, Menciptakan keterpaduan antar bentuk dan ruang pada kawasan sekitarnya, kelima, Mengutamakan penghijauan (lansdcape) yang sesuai dengan iklim daerah tropis serta ruang terbuka yang berperan positif bagi pembangunan kawasan terpadu, keenam, Meningkatkan kualitas lingkungan binaan yang berada didalam kawasan kandi maupun disekitarnya, ketujuh, Menyediakan suatu Resort dan olahraga terpadu yang dapat dinikmati oleh seluruh warga kota maupun wisatawan.

Kebijakan lain adalah penataan lingkungan bagian kawasan kota Sawahlunto secara terpadu, dimana fungsi utama kawasan adalah untuk wisata dan rekreasi seperti taman, tempat berkemah, kebun binatang mini, stadion olah raga dan pacu kuda serta terdapat juga fasilitas hotel dengan fasilitas pendukungnya dan juga terdapatnya kawasan lingkungan perumahan ditampung dalam sebuah lahan tunggal. Keteraturan dan keserasian antara berbagai peruntukan ini menjadikan Resort Kandi dan sekitarnya sebagai "kawasan pengembangan wisata terpadu".

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto sebagai berikut :

“Konsep penataan bangunan dan lingkungan di kawasan resort kandi diarahkan dengan penggunaan kawasan wisata terpadu dimana dalam satu kawasan terdapat beberapa jenis wisata serta fasilitas penunjang lainnya seperti, kawasan stadion olah raga, pacu kuda, camping ground, iptek park, hotel dan bisnis centre, hotel dan convention centre, safari park, sirkuit, perumahan dan kawasan danau. Konsep penataan fungsi bangunan sebagai Resort terpadu” (hasil wawancara pada tanggal 26 Mei 2010).

Konsep pengembangan resort Kandi itu sendiri sudah tertuang dalam master plan resort kandi yang menyatakan bahwa ada tiga konsep yang digunakan dalam pengembangan objek wisata resort kandi yaitu :

1. Konsep Integrasi Spatial.

Pengembangan wisata pada Kawasan Kandi dilakukan dengan menciptakan adanya keterkaitan antara objek-objek yang ada pada Kawasan Kandi sendiri dengan objek-objek wisata sekitar Kawasan Kandi. Konsep pengembangan integrasi spatial yang lebih jelasnya untuk diterapkan di Kawasan Kandi dapat dilihat pada uraian berikut :

- a. Integrasi objek-objek wisata agar dapat dinikmati dalam satu rangkaian perjalanan wisata/Pengembangan Paket Wisata.

Konsep integrasi objek-objek wisata yang dimaksud adalah menciptakan berbagai aktifitas wisata disetiap objek yang ada, namun pada masing-masing objek tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda-beda sehingga tercipta suatu image bahwa jika datang ke Resort Kandi sangat merugi sekali jika tidak mengunjungi objek-objek yang ada disana. Dengan demikian objek-objek yang ada di Kawasan Kandi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat hanya dilihat dari salah satu objek saja

kemudian sudah merasa telah melihat secara keseluruhan Resort Kandi. Untuk mewujudkannya maka pada Resort Kandi juga akan dibentuk menjadi satu paket wisata. Konsep pengembangan paket wisata Kandi disusun dengan memperhatikan kecenderungan permintaan dan selera pasar, serta pemunculan program-program/atraksi baru yang inovatif dan memiliki kekhasan.

- b. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan bangunan untuk pengembangan kegiatan atraksi dan sarana wisata.

Konsep optimalisasi pemanfaatan lahan adalah merupakan sebuah langkah yang dapat di gunakan untuk optimalisasi potensi yang ada. Oleh sebab itu pemanfaatan lahan yang dilakukan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan potensi alam yang ada dengan di dukung oleh aktifitas wisata seperti untuk lokasi tempat suatu atraksi wisata, lahan parkir, taman, MCK dan lain-lainnya. Pada akhirnya akan menciptakan penggunaan lahan yang sesuai dengan kebutuhan untuk suatu aktifitas wisata terpadu.

- c. Penzoningan.

Untuk menciptakan pengembangan yang baik dan penataan yang lebih teratur serta tidak tumpang tindih maka harus dilaksanakan dengan penzoningan. Pelaksanaan penzoningan pada Resort sangat mutlak dilakukan karena penzoningan merupakan langkah awal dalam menentukan bentuk kawasan yang akan direncanakan, sehingga dengan melakukan penzoningan nantinya akan diketahui fungsi serta aktifitas apa saja yang akan ada pada suatu kawasan. Konsep zoning

akan membentuk suatu pola yang teratur serta sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan terhadap sebuah kawasan.

d. Pola pergerakan

Pola pergerakan merupakan sebuah konsep yang sangat menentukan bagaimana sirkulasi yang ada dalam sebuah objek pariwisata. Pola pergerakan sangat menentukan dalam hal aktifitas apa aja yang akan dilakukan di setiap objek yang ada. Dengan membentuk pola pergerakan yang baik akan mempermudah pergerakan wisatawan baik didalam objek maupun antar objek wisata yang berdekatan satu sama lainnya. Konsep pola pergerakan ini nantinya juga akan mendukung perwujudan dalam membentuk Resort Kandi menjadi terintegritas dengan baik satu sama lainnya.

2. Konsep Local Economic Development.

Pengembangan pariwisata pada Kawasan Kandi dilakukan dengan bertumpu pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Konsep ini dapat diterapkan dengan cara menahan wisatawan untuk lebih lama tinggal di Resort Kandi, dengan cara menyajikan berbagai atraksi wisata sehingga secara tidak langsung wisatawan yang berkunjung membelanjakan uangnya di Kawasan Resort Kandi. Selain dengan cara mengembangkan berbagai atraksi wisata, juga diarahkan adanya pengembangan home industri oleh masyarakat lokal dalam membuat souvenir-souvenir yang dapat dijual kepada wisatawan. Hal ini menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat lokal.

3. Konsep Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan.

Selain dari konsep di atas dalam pengembangan objek wisata resort kandi juga menggunakan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, karena konsep pengembangan kawasan yang berwawasan lingkungan ini merupakan sebuah konsep yang menjadi sasaran utama dalam setiap pembangunan. Konsep pengembangan berwawasan lingkungan tidak hanya pada perencanaan pembangunan perumahan, pemukiman, perkantoran atau sarana dan prasarana umum saja tetapi juga untuk pengembangan kawasan pariwisata.

Pengembangan Resort Kandi yang berwawasan lingkungan maksudnya adalah menselaraskan antara pengembangan pariwisata dengan lingkungan sekitarnya bahkan pengembangan pariwisata dituntut agar dapat lebih ramah terhadap lingkungan yang ada. Dengan penerapan konsep ini diharapkan pengembangan pariwisata tidak merusak terhadap lingkungan sekitarnya terutama kawasan-kawasan yang berada berdampingan dengan lingkungan yang masih asri. Dengan kata lain pengembangan pariwisata Kandi tidak merusak lingkungan. Pelaksanaan konsep yang berwawasan lingkungan ini pada pengembangan Resort Kandi nantinya akan lebih dititik beratkan agar pengembangan yang akan dilakukan lebih memanfaatkan keaslian alam/lingkungan sekitarnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto sebagai berikut :

"salah satu konsep yang digunakan dalam pengembangan kawasan wisata resort kandi adalah konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, dimana diharapkan dengan pengembangan kawasan kandi ini tidak merusak lingkungan yang ada, justru diharapkan sebagai

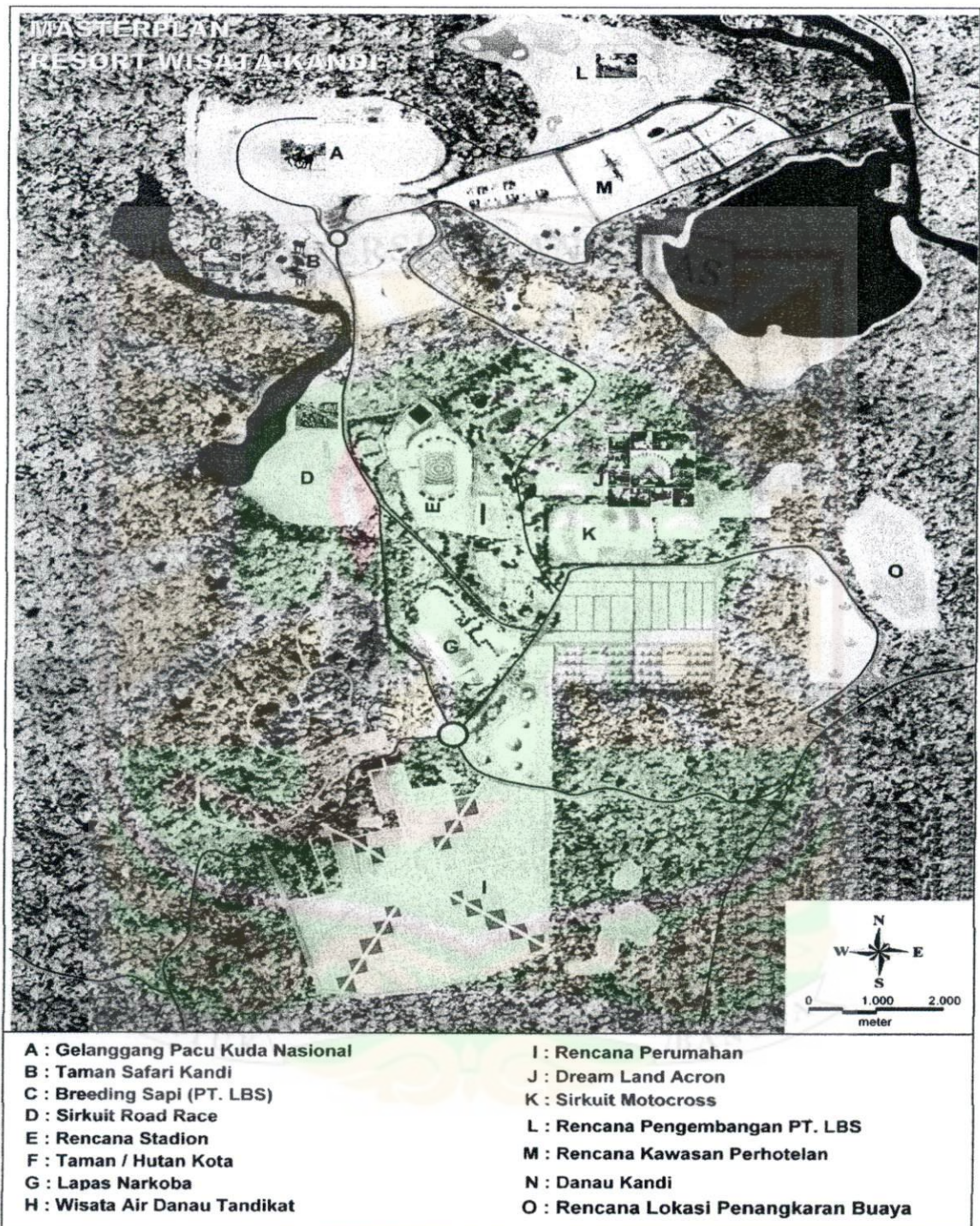
wahana pelestarian lingkungan dengan memanfaatkan keaslian alam/lingkungan sekitarnya”(hasil wawancara tanggal 5 Mei 2010).

Dalam pengembangan kegiatan/aktivitas-aktivitas penunjang kegiatan kepariwisataan yang akan direncanakan di Kawasan Kandi, harus memiliki kajian mengenai dampak dari aktivitas-aktivitas yang akan dikembangkan baik itu dampak terhadap lingkungan, manusia dan aktivitas sekitar kawasan.

Untuk lebih jelasnya penataan kawasan kandi dapat dilihat pada gambar master plan resort kandi sebagai berikut :



Gambar 3 : Master Plan Resort Wisata Kandi



Sumber : Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto tahun 2010

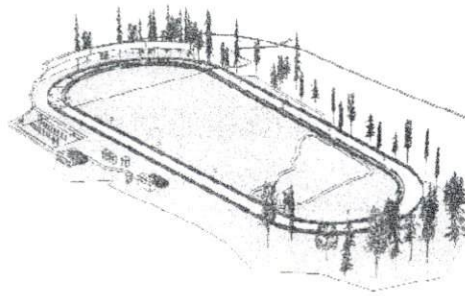
B.2. Implementasi Kebijakan.

1. Konsep Integrasi Spatial.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan terlihat bahwa konsep integrasi spatial ini sudah mulai diterapkan dalam pengembangan pariwisata resort kandi. Hal ini terbukti dengan pembangunan fisik objek wisata yang telah dikembangkan di Kawasan Resort Kandi antara lain Objek Pacuan Kuda berstandar Nasional, *Breeding farm*, Dermaga Danau Kandi, Wisata Air Danau Tandikat, Sirkuit *Road Race*, *Camping Ground* dan *Outbond*, Arena *Motocross* dan saat ini sedang dibangun Sawahlunto Dream Land dengan dana yang berasal dari swasta murni dari investor yang merupakan warga Sawahlunto. Berikut deskripsi singkat tentang kondisi masing-masing objek wisata yang telah ada, antara lain:

- Objek Pacuan Kuda

Terletak di bagian utara wilayah Resort Kandi dengan standar nasional. Luas lahan yang disediakan 39,69 Ha, ketinggian 300 m dpl dengan status milik Pemerintah Kota Sawahlunto. Fasilitas pendukung yang tersedia saat ini berupa: (1) track pacuan dengan panjang 1.400 meter dan lebar 20 meter; (2) tribune VVIP dengan kapasitas 300 penonton, tribune VIP dengan kapasitas 500 penonton, tribune masyarakat dengan kapasitas lebih dari 30.000 penonton; (4) kandang kuda dengan kapasitas 200 ekor kuda; (5) dua unit *tower judge* dan *steward*; (6) jalan aspal menuju kawasan; (7) jalan kuda, foto finish, *Mounting Yard*, *Saddling Paddock*; dan (7) sarana penunjang lainnya seperti mushalla, toilet, kafetaria, dan lahan parkir permanen dan non permanen.

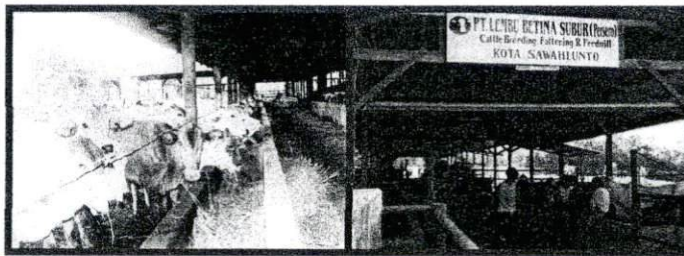


Gambar 4 : Objek Pacuan Kuda Kanditahun 2010.

Kendala yang ditemui di lapangan adalah kurangnya aspek pengelolaan objek karena begitu selesai sebuah *event* kejuaran, kondisi objek tidak terawat, sampah berserakan dimana-mana dan rumput dibiarkan tumbuh tak beraturan.

- *Breeding farm*

Berada di sebelah utara kawasan resort kandi, tepatnya dipinggir Danau Tandikek. Luas lahan yang tersedia 11.00 Ha, berada di ketinggian 290 m dpl dengan status milik Pemerintah Kota Sawahlunto dan merupakan wilayah peternakan sapi terbesar di kota ini. Sarana yang tersedia saat ini adalah kandang dengan kapasitas ± 600 ekor, lahan rumput, akses jalan ke lokasi serta sumber air. Dikelola oleh PT Lembu Betina Subur yang merupakan perusahaan patungan antara Pemda Sawahlunto dengan investor swasta dari Jakarta. Dibangun dalam bentuk demplot-demplot dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk belajar beternak.



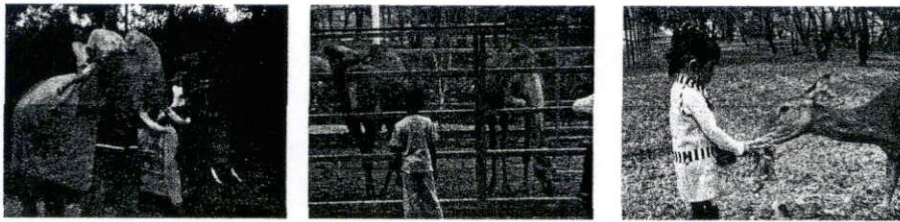
Gambar 5 : Objek *Breeding farm* Kandi tahun 2010

- Taman Satwa Kandi

Objek wisata ini berdiri pada lahan seluas 2 Ha, pembangunan objek ini sebagai objek wisata yang bisa dikunjungi tiap hari dan merupakan tahap awal dari rencana untuk pembangunan objek yang lebih besar lagi yaitu Taman Safari Kandi. Sarana yang terdapat sudah cukup memadai.

Prasarana jalan di lokasi taman satwa kandi cukup memadai ditambah dengan adanya tempat parkir yang luas di sebelah gerbang utamanya. Sarana yang tersedia berupa : (1) gerbang jaga yang sekaligus merupakan tempat penjualan tiket masuk; (2) pos keamanan; (3) mess bujangan tempat istirahat pengelola taman satwa; (4) kandang berbagai jenis satwa seperti gajah, unta, rusa, kangguru, monyet, kelinci, landak, kura-kura, ular, elang, merpati dan lain-lain; (5) arena atraksi gajah dan kuda poni; (6) gudang dan tempat pengolahan makanan satwa; (7) pos pemeliharaan kesehatan satwa (karantina).

Selain tempat wisata, objek ini diharapkan oleh pengelola sebagai tempat pembelajaran bagi generasi muda untuk melindungi dan menyayangi satwa. Taman Satwa Kandi merupakan ikon berwisata ke kawasan bekas tambang Kandi, karena selain dari Bukittinggi kawasan inilah yang mempunyai kebun binatang atau taman satwa.



Gambar 6 : Objek Taman Satwa Kandi tahun 2010

- **Rekreasi Air Danau Tandikek**

Berada bersebelahan dengan objek *Breeding farm*, merupakan kawasan wisata air. Luas danau 14 Ha dengan ketinggian 280 m dpl. Kawasan masih asri dan indah, dengan kedalaman danau \pm 5 meter dan berbentuk memanjang. Fasilitas yang tersedia saat ini yaitu : (1) Dermaga untuk wisata air; (2) 5 unit sepeda air; (3) 1 unit boat dan 1 unit rakit kayu, (4) 2 unit Permainan Bola Air, (5) 1 unit Banana Boat, (6) 1 unit permainan Flying Fox.

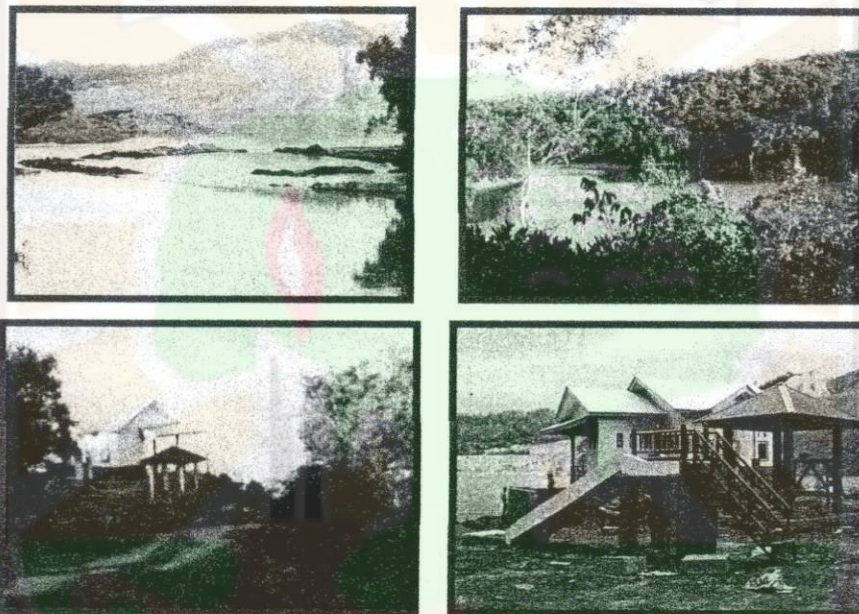


Gambar 7 : Objek Rekreasi air Danau Tandikek tahun 2010

- **Dermaga Danau Kandi**

Berada dipinggir dari Danau Kandi pada ketinggian 220 m dpl, dengan luas 2 Ha. Fasilitas yang ada berupa dermaga permanen yang biasanya digunakan tempat rekreasi dan makan keluarga oleh pengunjung yang datang ke sana. Pemandangan sangat indah, karena terbentuk akibat tembusnya badan sungai batang ombilin yang merembes masuk ke kolong bekas tambang yang dilakukan oleh sub kontrak dari PT BA-UPO yaitu PT AIC.

Kendala yang sering ditemui di lapangan yaitu jalan permanen menuju dermaga sering ambles terbawa longsor air dari tempat yang lebih tinggi. Drainase yang kurang baik menyebabkan hal itu terjadi. Sewaktu penelitian sudah dilakukan perbaikan jalan masuk dan juga membuatkan jalan alternatif ke Dermaga tersebut sehingga diharapkan jika terjadi lagi hal yang sama aktivitas kunjungan wisata masih tetap berjalan.



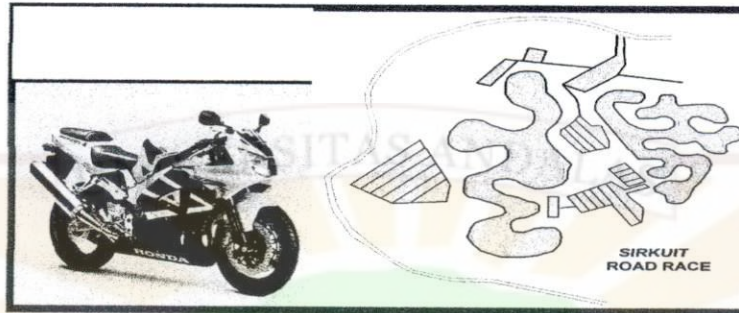
Gambar 8 : Objek Dermaga Danau Kandi tahun 2010

- *Sirkuit Road Race*

Di bagian tengah Kawasan Resort Kandi tepatnya di selatan Danau Tandikat, terdapat arena *Road Race* dengan sirkuit yang berstandar nasional pertama di Sumatera Barat. Luas lahan yang tersedia 10 Ha milik Pemerintah Kota Sawahlunto. Sarana yang tersedia antara lain adalah : (1) Track sirkuit standar nasional sepanjang 1,2 Km lengkap dengan fasilitasnya.

Potensi dari objek ini adalah salah satu olahraga yang digemari oleh generasi muda dan belum ada daerah di Sumatera Barat yang khusus

membangun sirkuit untuk kegiatan *Road Race* ini. Selain digunakan untuk perlombaan road race, arena ini juga digunakan sebagai trek permainan Gokart dan ATV.

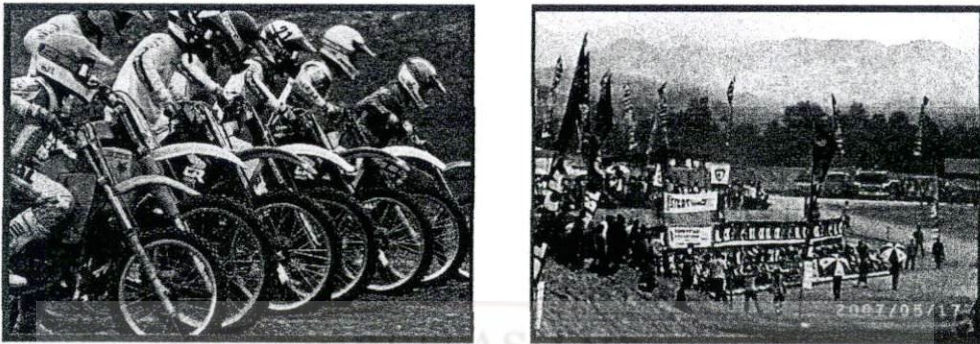


Gambar 9: Objek *Road Race* Kandi tahun 2010

- *Sirkuit Motocross*

Di bagian selatan kawasan objek wisata resort kandi tepatnya di sekitar Danau Tanah Hitam, dengan luas lahan 10 Ha. Pembangunan dan pengembangannya dibiayai oleh pihak swasta. Sudah masuk dalam kalender tetap IMI Sumatera Barat sebagai tuan rumah penyelenggara kejuaraan *motocross*. Sarana yang tersedia antara lain adalah : (1) Track sirkuit standar nasional; (2) Paddock; (3) Tower; (4) Mushalla, toilet dan kafetaria; (5) Tribune permanen.

Kendala yang ditemui dilapangan tidak ada karena dalam pelaksanaan setiap even kejuaraan, pengelola objek ini tetap berkoordinasi dengan pemerintah setempat melalui Kantor Pariwisata Kota Sawahlunto.



Gambar 10 : Objek Motocross Tanah Hitam tahun 2010

- *Camping ground dan Outbond*

Camping ground dan Outbond memiliki luas \pm 4 Ha yang berlokasi berseberangan dengan Danau Tadikat, dan di lokasi tersebut juga disediakan bagi pengunjung yang berminat untuk bermain "Paint Ball" pada saat penelitian menurut Kepala UPTD Kandi Bapak Drh. Syefrizal menyatakan bahwa sejak disediakan permainan Paint Ball pemasukan untuk pengelola telah mencapai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .

Disamping itu objek lain yang potensial untuk dibangun dan sedang dalam tahap penelitian pengembangan yang terdapat pada kawasan wisata Kandi, seperti : (1) Stadion Olahraga dengan lahan yang tersedia seluas 9,5 Ha yang berlokasi ditengah kawasan. Pembangunannya bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan sarana olahraga yang semakin meningkat; (2) Hotel, *cottage* dan penginapan yang pembangunannya menunggu investor yang berminat untuk berinvestasi; dan (3) Taman Safari yang rencananya merupakan pengembangan dari objek taman satwa yang ada sekarang.

Seluruh objek wisata yang ada di atas Menurut Kepala UPTD Kandi, akan dapat dinikmati oleh wisatawan atau pengunjung dengan waktu kunjungan yang cukup panjang antara 4 sampai 7 jam dimulai dari gerbang utama sebelah

utara, wisatawan yang datang akan disajikan pemandangan danau dengan dermaganya, disana wisatawan dapat beristirahat sambil menikmati pemandangan danau, selanjutnya perjalanan ke arah taman satwa kandi disana wisatawan dapat menyaksikan berbagai jenis binatang, dan diareal tersebut wisatawan juga dapat menikmati permainan air, yang dilengkapi dengan permainan flying fox, serta disediakan play ground bagi anak-anak mereka. Khusus bagi pengunjung yang memiliki hobby adu strategi berperang, di Kawasan Resort Kandi juga disediakan sarana game Paint Ball.

2. Konsep Local Economic Developmen.

Dari hasil observasi penulis dilapangan dapat dikatakan bahwa konsep local economic development belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terbukti pada saat penulis melakukan observasi ke lapangan terlihat bahwa belum adanya warung/toko yang menyediakan souvenir dan makanan khas Kota Sawahlunto, adapun toko atau warung yang ada saat ini hanya sebatas penyediaan makanan dan minuman bagi wisatawan atau pengunjung.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala UPTD Kandi sebagai berikut :

“Untuk memberikan kesempatan usaha bagi masyarakat sekitar, maka disediakan lahan untuk membangun warung makan dan kios permanen, saat ini sudah ada dua warung makan dan enam kios yang berada di dalam kawasan kandi ini” (hasil wawancara pada tanggal 4 Mei 2010).

Selain dari pada itu jika dilihat efek terhadap masyarakat dengan dikembangkannya objek wisata resort kandi, khususnya dalam peningkatan ekonomi masyarakat, sudah mulai dapat dirasakan, hal ini terbukti dengan terbukanya lapangan kerja seperti pegawai harian/honorer di kawasan kandi

yang diutamakan adalah warga Kota Sawahlunto, begitu juga dengan pengelolaan parkir juga dikelola oleh warga sekitar kawasan tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPTD Kandi sebagai berikut:

“Saat ini sebagian pegawai baik honorer maupun petugas lapangan di Kandi ini adalah warga sekitar kawasan, dan khusus untuk petugas parkir diserahkan pengelolaannya pada pemuda setempat, dan semua uang yang diperoleh itu untuk mereka” (hasil wawancara pada tanggal 4 Mei 2010).

3. Konsep Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan.

Dari hasil observasi penulis ke lapangan terlihat bahwa pengembangan objek wisata Resor Kandi sudah menggunakan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Hal ini terbukti dengan pentaan arena atau wahana wisata yang ada, seperti lapangan pacuan kuda yang dibangun di atas lahan yang memang sudah terbuka, begitu juga dengan kawasan taman satwa kandi yang memanfaatkan danau tandikat yang dijadikan wahana wisata air. Dan sebagian wilayah yang masih merupakan kawasan hutan dijadikan wahana outbond dan permainan paint ball, dengan arti kata bahwa pengembangan objek wisata Resort Kandi disesuaikan dengan potensi alam yang ada tanpa harus merubah bentuk suatu kawasan. Namun dalam pengelolaan objek wisata yang ada, masih kurang memperhatikan kebersihan lingkungan, hal ini terlihat pada kawasan pacuan kuda dan arena road race, dimana setiap kali kegiatan dilaksanakan, selalu meninggalkan sampah yang bertebaran, sehingga merusak keasrian lingkungan yang ada. Sebagai mana yang disampaikan oleh Kepala UPTD Kandi sebagai berikut :

“Dalam pengembangan objek wisata ini kita memanfaatkan potensi alam yang ada seperti kawasan satwa kandi, arena outbond dan paint ball serta objek yang lain. Namun yang kita sayangkan adalah setiap event olahraga yang dilakukan seperti pacu kuda dan road race, selalu meninggalkan sampah yang

bertebaran, dan setelah kami sampaikan kepada panitia, baru ada tindakan panitia untuk membersihkannya, dan bahkan terpaksa kami yang mengurus sampah yang ada agar kawasan ini selalu terlihat asri". (hasil wawancara tanggal 4 Mei 2010).

Dalam pengembangan pariwisata di Kota Sawahlunto seperti yang telah tertuang dalam visi dan misi kota sudah merupakan target yang pasti, dimana pemerintah kota sawahlunto ingin mewujudkan Sawahlunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Dimana pengembangan kepariwisataan dititik beratkan pada pemanfaatan kawasan bekas aktifitas pertambangan. Hal ini dikarenakan Kota Sawahlunto merupakan kota tambang batu bara, dan saat ini deposit batubara mulai berkurang sehingga banyak lahan-lahan bekas tambang terbuka yang terbengkalai dan masih banyak bangunan-bangunan bersejarah yang bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata. Pada tahun 2010 ini pemerintah Kota Sawahlunto seperti yang diasampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto berencana mengoptimalkan semua potensi wisata yang ada termasuk pengembangan objek wisata Resort Kandi guna mewujudkan Sawahlunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya, dan target utama saat ini adalah menjadikan Kota Sawahlunto sebagai kota utama di Sumatera Barat.

Dalam rangka mensosialisasikan kebijakan pemerintah Kota Sawahlunto khususnya dalam pengembangan kepariwisataan di kota sawahlunto kepada masyarakat telah dilakukan beberapa kegiatan seperti publik hearing yang dihadiri seluruh elemen masyarakat, dan setiap bulannya dilakukan rapat koordinasi pemerintah kota dengan perangkat desa/kelurahan serta tokohmasyarakat se-Kota Sawahlunto yang dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan Setdako. Selain itu juga dalam setiap kesempatan atau event-

event tertentu, pemerintah kota sawahlunto selalu menyampaikan kebijakan-kebijakan dalam rangka pengembangan kepariwisataan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto sebagai berikut:

“Dalam rangka mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah kota kepada masyarakat, dilakukan melalui kegiatan-kegiatan rutin tahunan seperti publik hearing, dan juga kegiatan bulanan, serta pada setiap kesempatan atau event-event tertentu”(hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2010).

Dari uraian tersebut terlihat bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program pembangunan terutama dalam rangka pengembangan pariwisata di kota sawahlunto karena hal tersebut merupakan visi kota kedepan.

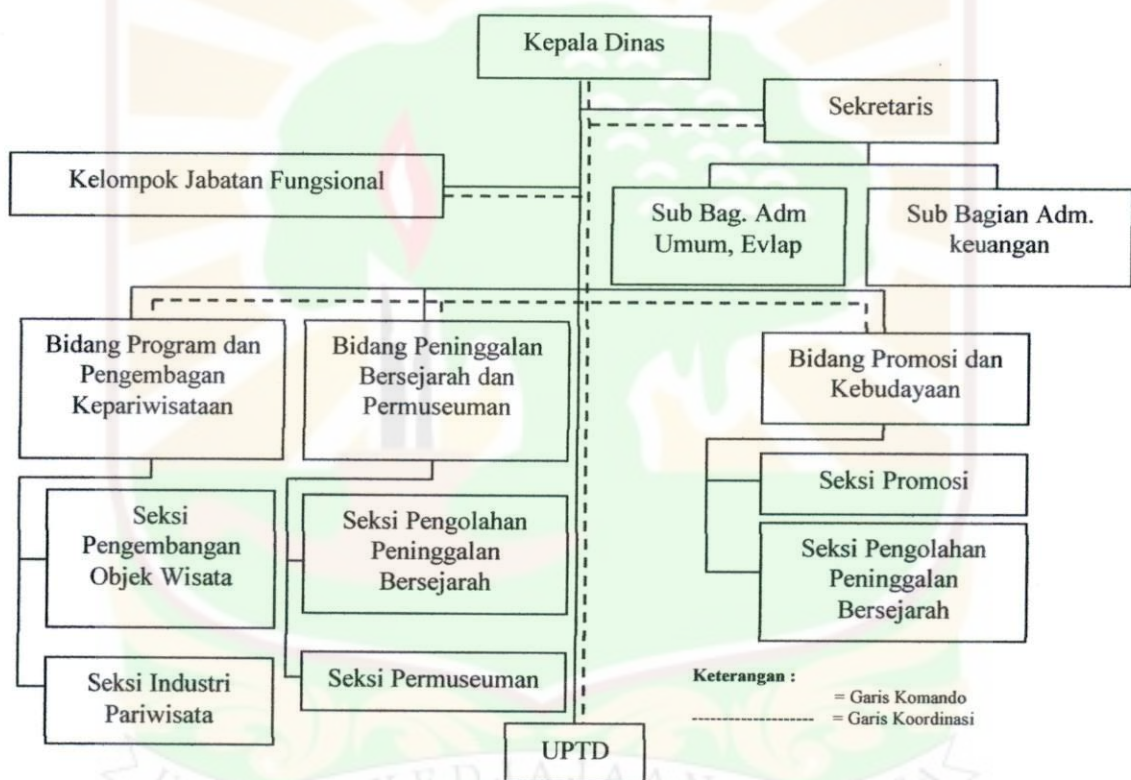
C. Program Untuk Mengimplentasikan Kebijakan.

Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri, perlu dipertimbangkan dalam segala macam segi tanpa terkecuali, karena pariwisata sebagai suatu industri tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan sektor-sektor ekonomi, sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Jika pengembangan pariwisata tidak terarah dan tidak direncanakan dengan matang, maka bukan manfaat yang akan diperoleh tetapi perbenturan sosial, kebudayaan, kepentingan dan akibatnya pelayanan wisatawan akan menjadi korban dan selanjutnya akan mematikan usaha-usaha yang telah lama dibina.

Sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah kota sawahlunto di bidang kepariwisataan dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto yang dibentuk dengan dikeluarkannya Perda Nomor : 6 tahun 2008

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang disahkan pada tanggal 15 September 2008. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota sawahlunto berdasarkan Perda Nomor 6 tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 11. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota sawahlunto



(Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto tahun 2010)

Pembangunan Pariwisata di Kota Sawahlunto secara efektif baru berjalan sejak tahun 2002, sejalan dengan disusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Sawahlunto pada akhir tahun 2001.

Beberapa program yang sesuai dengan perencanaan tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan kemampuan Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Manusia yang ada di Kota Sawahlunto.

Sarana dan prasarana pelayanan kepariwisataan masih sangat terbatas, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pembangunan Pariwisata juga memerlukan pemahaman dan persepsi yang sama antar seluruh pelaku pembangunan, sementara saat ini kesamaan persepsi mengenai pengembangan pariwisata belum terbangun secara maksimal. Indikator lain yang menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan pariwisata adalah jumlah kunjungan wisata baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ke Kota Sawahlunto.

Visi Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001, yaitu "Terwujudnya Pariwisata Tambang Yang Berbudaya pada Tahun 2020", sedangkan misi yang akan dilaksanakan adalah :

- ✚ Mengembangkan potensi pariwisata yang bersih sesuai dengan norma sosial dan norma budaya.
- ✚ Mengembangkan sarana dan prasarana kepariwisataan.
- ✚ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- ✚ Mengekspresikan peninggalan bersejarah dan kegiatan tambang batubara sebagai objek dan daya tarik wisata
- ✚ Menggali dan menumbuhkembangkan kebudayaan tradisional untuk mendorong pengembangan pariwisata.
- ✚ Mengembangkan Objek Wisata alam untuk menunjang Wisata Tambang

Arah Kebijakan Umum yang ditetapkan Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas objek dan daya tarik wisata yang mampu menjangkau seluruh lapisan wisatawan.
2. Membangun kerjasama promosi dengan usaha jasa pariwisata dan kerjasama promosi antar daerah.
3. Mewujudkan pemahaman dan persamaan persepsi mengenai pembangunan kepariwisataan Kota Sawahlunto.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan di objek wisata serta sarana dan prasarana penunjang wisata.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan pariwisata.
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur dalam bidang kepariwisataan.
7. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Sawahlunto.

Strategi yang ditetapkan Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang hakekat pembangunan Pariwisata
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Masyarakat.
3. Pembangunan Fasilitas Objek dan Daya Tarik Wisata dan pengembangan manajemen pelayanan umum.

4. Meningkatkan pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam memelihara dan melestarikan Seni dan Budaya Daerah Khas Kota Sawahlunto.
5. Meningkatkan pembinaan keagamaan dan Adat Istiadat ditengah masyarakat.

Prioritas yang ditetapkan Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan objek wisata tambang dan peninggalan bersejarah
2. Sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya pembangunan Pariwisata Pasca Penambangan Batubara.
3. Menumbuhkan dan mengembangkan kesenian dan Budaya Daerah melalui pengadaan fasilitas dan pembinaan sanggar-sanggar seni serta penampilan atraksi seni dan budaya daerah.
4. Peningkatan Kualitas sumberdaya manusia aparatur Pariwisata dan sumberdaya manusia yang bergerak dalam bidang usaha jasa pariwisata seperti hotel/penginapan dan restoran.
5. Mengintensifkan promosi Objek dan Daya Tarik Wisata yang telah ada di Kota Sawahlunto melalui keikutsertaan Stakeholder Pariwisata dalam event-event pariwisata tingkat Kab/Kota, Propinsi, Regional dan Tingkat Nasional.

Dalam rangka pengembangan pariwisata di Kota Sawahlunto cukup banyak program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto, seperti yang telah disampaikan oleh Kabid Program dan Pengembangan

Kepariwisataan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan, beliau menyatakan sebagai berikut :

“Dalam rangka pengembangan kepariwisataan di kota sawahlunto kita telah merumuskan beberapa program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan diakomodir dalam APBD kota Sawahlunto khusus untuk pengembangan objek wisata resort kandi kita juga membuat beberapa program dan kegiatan yang lebih dititik beratkan kepada bagaimana objek wisata resort kandi ini bisa lebih baik dan memiliki sarana wisata yang lebih bervariasi agar pengunjung tidak merasa bosan dan lebih lama menikmati objek wisata yang ada”(hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2010).

Untuk lebih jelasnya adapun program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam rangka pengembangan objek wisata Resort Kandi selama tahun 2009 yang tercantum dalam DPA-SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2009 yang merupakan penjabaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto tahun 2009 sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Program dan Kegiatan dalam Pengembangan Objek Wisata Resort Kandi

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU DANA (Rp)
Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata		
1.	Operasional dan pengelolaan sarana wisata air	Rp. 289.745.000,-
2.	Operasional dan Pengelolaan Aneka Mainan Bermotor	Rp. 144.075.000,-
3.	Operasional dan Pemeliharaan Taman Satwa Kandi	Rp. 612.333.500,-
4.	Pemeliharaan Plaza, Gazebo, Dermaga Danau Tandikek dan Gerbang Utama Masuk Kawasan Wisata Kandi	Rp. 83.720.000,-
5.	Operasional dan Pengelolaan Area Road Race	Rp. 258.375.000,-
6.	Penataan Landscape Sirkuit Aneka Mainan Bermotor	Rp. 101.435.000,-
7.	Lanjutan Pengembangan Taman Satwa Kandi	Rp. 917.525.000,-
8.	Operasional Pengelolaan Outbound	Rp. 186.258.000,-
JUMLAH		Rp.2.593.466.500,-

Sumber: APBD Kota Sawahlunto Tahun 2009.

Dari tabel di atas dalam dilihat bahwa jumlah kegiatan yang dilakukan selama tahun 2009 oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam rangka pengembangan objek wisata Resort Kandi adalah sebanyak delapan kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.593.466.500,- (Dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah). Dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

- Operasional dan pengelolaan sarawan wisata air.

Dari jumlah anggaran Rp. 289.745.000,- yang terealisasi adalah sebanyak Rp.281.336.500,- atau 97,10 % dari total dana yang dianggarkan. Pelaksanaan kegiatan ini ditandai dengan beroperasionalnya Sarana Wisata Air yang ada seperti, Sepeda Air, Speed Boat, Banana Boat dan Kayak. CV.Yanjun Pekerjaan : pemasangan Handdril Dermaga, CV.Andi Bersaudara Pekerjaan : Pengadaan Kapal Motor Sepeda Air Jenis Anggsa 2 Buah, Sepeda Air Jenis Paus 3 Buah dan Perahu Jug –Kepala Naga perahu Naga Rekreasi. Sedangkan dana yang tidak terealisasi sebanyak Rp.8.408.500,-. (Sumber: Laporan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto tahun 2009).

- Operasional dan Pengelolaan Aneka Mainan Bermotor.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp.144.075.000,- dana yang terealisasi adalah sebanyak Rp.137.004.000,- atau 95,09% dari total dana yang dianggarkan. Adapun kegiatan Operasional dan pengelolaan Aneka mainan bermotor adalah pengadaan 2 unit ATV yang dikerjakan oleh CV Dola Putri, untuk Operasional Aneka Mainan Bermotor, suku cadang ATV dan Mini Cross sangat susah didapat. Sedangkan dana yang tidak terealisasi sebanyak

Rp.7.071.000,-. (Sumber: Laporan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto tahun 2009)

- Operasional dan Pemeliharaan Taman Satwa Kandi.

Dari jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.612.333.500,- yang terealisasi sebanyak Rp.601.176.150,- atau 98,18% dari total anggaran. Hasil dari pekerjaan ini adalah terpeliharanya Taman Satwa Kandi dengan keberhasilan Ramainya pengunjung Taman satwa Kandi. Adapun pekerjaan dimaksud adalah Pengadaan Pakaian Indian Cowboy, yang dilaksanakan oleh CV.Majoindo Jaya. Banyak peminat untuk berfoto –foto pakai baju Indian cowboy. Dana yang tidak terealisasi sebanyak Rp.11.157.350,- (Sumber: Laporan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto tahun 2009).

- Pemeliharaan Plaza, Gazebo, Dermaga Danau Tandikek dan Gerbang Utama Masuk Kawasan Wisata Kandi.

Dana yang terealisasi sebanyak Rp.75.645.600,- atau sebesar 90,36% dari total anggaran. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemasangan Handdril dermaga yang dilaksanakan oleh Cv.Yanjun. Pemeliharaan Plaza, Gazebo, dan Dermaga danau tandikek dilaksanakan selama 1 tahun dalam pekerjaan ini dibuat Dermaga parkir sepeda air, pemasangan pembuatan persok tanaman merambat serta paving Blok arena wisata air. Dana yang tidak terealisasi sebanyak Rp.8.074.400,- (Sumber: Laporan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto tahun 2009).

- Operasional dan Pengelolaan Area Road Race.

Dana yang terealisasi sebanyak Rp.243.658.000,- atau sebesar 94,30% dari total anggaran yang disediakan. Adapun kegiatan disini adalah

pembenahan Area Road Race yang dikerjakan oleh CV. Zaki Mitra Indoguna dan Pengadaan 4 Unit Gokar 200 cc beserta accessories lainnya melalui Tender yang dimenangkan oleh CV.Dola Putri. Sedangkan dana yang tidak terealisasi sebanyak Rp.14.717.000,- (Sumber: Laporan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto tahun 2009).

- Penataan Landscape Sirkuit Aneka Mainan Bermotor.

Dana yang terealisasi sebanyak Rp.99.414.750,- atau sebesar 98,01% dari total anggaran. Kegiatan Pembuatan Landscape Sirkuit Aneka Mainan Bermotor yang dikerjakan oleh CV.SURYA GRAHA. Pembuatan Gudang Aneka Mainan Bermotor yang dikerjakan oleh CV.Verlian. Dengan adanya Gudang penyimpan alat-alat Mainan Bermotor maka keamanan bagi karyawan mudah dan tidak repot lagi memasukan dan mengeluarkan alat-alat tersebut. Sedangkan dana yang tidak terealisasi sebanyak Rp.2.020.250,- (Sumber: Laporan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto tahun 2009).

- Lanjutan Pengembangan Taman Satwa Kandi.

Dana yang terealisasi sebanyak Rp.846.403.850,- atau sebesar 92,25% dari total anggaran yang disediakan. Kegiatan yang dilaksanakan disini ada beberapa kegiatan antara lain Pembuatan tempat Nursery Tanaman hias. Pengadaan/penanaman Bunga dilingkungan Taman Satwa Kandi yang dikerjakan oleh CV, RICH TECH dengan nilai kontrak Rp.25.000.000,- Pembuatan Pergola / halte / Tanaman hias merambat. Pengadaan Kursi Taman yang dikerjakan oleh CV. Empat Putri. Lanjutan Pembangunan Klinik Hewan yang dikerjakan oleh CV. Sempurna. Pembuatan Gerbang dan pagar yang dikerjakan oleh CV.Bimas Putera. Pembuatan kios sebanyak 4

Unit yang dikerjakan oleh CV. Putra Bungsu. Sedangkan dana yang tidak terealisasi sebanyak Rp.71.121.150,- (Sumber: Laporan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto tahun 2009).

- Operasional Pengelolaan Outbound.

Dana yang terealisasi sebanyak Rp.184.559.950,- atau sebesar 99,09% dari total anggaran yang disediakan. Kegiatan Pembelian Areal Out Bound. Pengadaan Alat2 bermain Kebudayaan dikerjakan oleh CV.Gemini. Sedangkan dana yang tidak terealisasi sebanyak Rp.1.698.050,- (Sumber: Laporan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto tahun 2009).

D. Hasil Implementasi Kebijakan.

Dari program dan kegiatan serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sawahlunto untuk pengembangan objek wisata Resort Kandi di atas secara umum sudah menampakkan hasil. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisata khususnya ke objek wisata Resort Kandi setiap tahunnya. Terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke objek wisata Resort Kandi yang tentunya meningkatkan jumlah PAD Kota Sawahlunto dari sektor pariwisata khususnya Kawasan Resort Kandi. Untuk melihat tingkat kunjungan wisata ke objek resort kandi serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari hasil penjualan tiket dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5. Jumlah Kunjungan Objek Wisata Resort Kandi tahun 2007 s/d 2009.

Bulan / Tahun	2007		2008		2009	
	Kunjungan	Rupiah	Kunjungan	Rupiah	Kunjungan	Rupiah
Jan	414	1.314.000	4.809	40.950.000	6.065	40.392.000
Feb	1.832	5.104.000	3.539	17.893.000	2.891	16.087.000
Mar	2.051	5.452.000	3.730	24.602.500	2.958	24.854.500
April	2.346	5.850.000	5.579	29.109.500	2.599	5.226.500
Mei	1.657	3.832.500	5.107	35.839.000	6.293	38.380.500
Juni	3.498	7.667.000	8.705	49.690.000	8.916	49.069.000
Juli	1.966	4.086.000	7.794	44.812.500	5.219	9.632.500
Agust	920	6.000.500	3.036	15.670.000	2.263	12.422.000
Sept	629	1.354.500	178	346.000	37.413	128.384.000
Okt	12.631	40.654.500	32.466	153.279.500	1.596	16.075.000
Nov	1.154	3.335.000	2.141	11.273.500	4.151	295.581.500
Des	4.205	11.583.000	6.459	31.338.000	4.775	38.603.500
Jumlah	33.303	96.233.000	83.543	454.803.500	85.139	674.708.000

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto (olahan penulis Tahun 2010).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kunjungan wisata ke objek wisata resort kandi setiap bulan mengalami perubahan dan kunjungan tertinggi terjadi pada masa liburan antara bulan september dan oktober, seperti pada tahun 2007 dari total kunjungan sebanyak 33.303 orang terjadi lonjakan pengunjung pada bulan Oktober sebanyak 12.631 orang atau 37,93 % dari total kunjungan pada tahun yang bersangkutan. Dan pada tahun 2008 dari total 83.543 kunjungan terjadi lonjakan pada bulan Oktober yaitu sebanyak 32.466 atau 38,86% dari total kunjungan pada tahun yang bersangkutan. Serta pada tahun 2009 dari total kunjungan sebanyak 85.139 orang, terjadi lonjakan pengunjung pada bulan September yaitu sebanyak 37.413 atau 43,94 % dari total kunjungan pada tahun yang bersangkutan, dimana pengunjung yang datang berasal dari Kota Sawahlunto sendiri serta dari Kota/kabupaten lain di

Sumatera Barat, dan bahkan ada sebagian pengunjung berasal dari Propinsi tetangga seperti Propinsi Riau dan Jambi. Sementara itu pada bulan-bulan lainnya rata-rata pengunjung adalah warga Kota Sawahlunto yang ingin mengisi hari liburnya bersama keluarga di objek wisata Resort Kandi tersebut.

Begitu juga apabila dilihat jumlah kunjungan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan hal ini terlihat pada tahun 2007 jumlah kunjungan sebanyak 33.303, dengan jumlah PAD yang diterima pada tahun tersebut adalah sebesar Rp. 96.233.000,- meningkat secara signifikan pada tahun 2008 yaitu sebesar 150,86 % menjadi 83.543 pengunjung, dengan jumlah PAD yang diterima sebesar Rp. 454.803.500,-. Namun pada 2009 peningkatan jumlah kunjungan hanya 1,91 % dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 85.139 orang pengunjung, dan jumlah PAD yang diterima pada tahun tersebut adalah sebesar 674.708.000,-.

E. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Proses Pengembangan Kawasan Wisata Kandi.

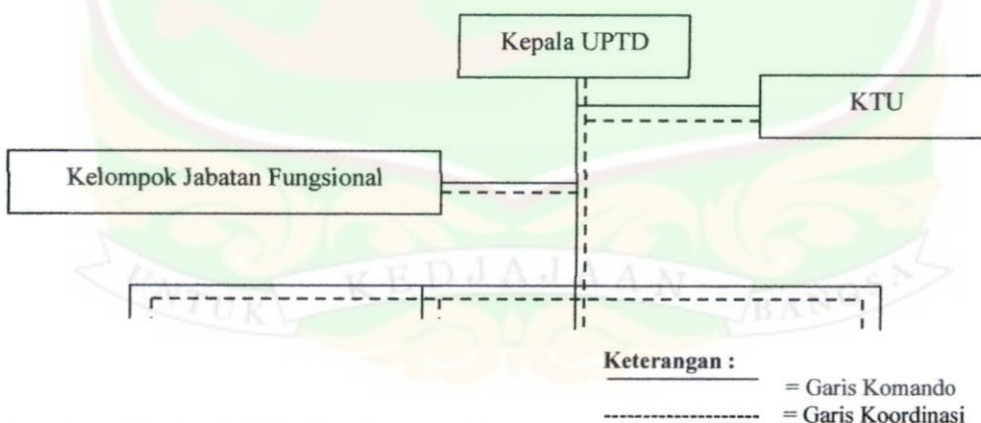
Dalam pengimplementasian suatu program tidak akan pernah terlepas dari kendala dan hambatan-hambatan ataupun permasalahan, tidak terkecuali dalam menjalankan kebijakan pengembangan objek wisata resort kandi, selain itu juga dalam pengambilan kebijakan tentunya melalui kajian-kajian yang mendalam termasuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi pendukung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan.

Unit kerja sebagai implementator kebijakan di bidang kepariwisataan di Kota Sawahlunto adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto yang dibentuk melalui Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2008. Khusus untuk

pengelolaan kawasan kandi juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kandi yang dipimpin oleh Seorang Pejabat Eselon IV.A, yang bentuk melalui Peraturan Walikota Nomor 10 tahun 2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kandi. Adapun tujuan dibentuknya UPTD kandi ini menurut Sekretaris Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto adalah sebagai perpanjangan tangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto, dan agar pengelolaan kawasan kandi ini betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik serta diharapkan dapat menjadikan kawasan kandi menjadi ikon pariwisata di Kota Sawahlunto.

UPTD kandi yang ada saat ini memiliki pegawai sebanyak 68 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 5 orang, 3 orang pegawai Kontrak, dan 60 orang pegawai lepas yang ditunjuk sebagai pengelola atau petugas lapangan, yang ditempatkan disetiap wahana wisata yang ada. Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi UPTD Kandi adalah sebagai berikut :

Gambar 12 : Struktur Organisasi UPTD Kandi



(sumber: Kantor UPTD Kandi tahun 2010)

UPTD kandi mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan terhadap objek wisata resort kandi. Dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto. Saat penelitian dilakukan UPTD

Kandi dipimpin oleh seorang Dokter Hewan yakni Drh. Syefrizal, dan dibantu oleh satu orang kepala sub bagian tata usaha serta enam orang staf. Sementara untuk kegiatan di lapangan UPTD Kandi memiliki petugas sebanyak 60 orang, yang memiliki tugas dan fungsi berbeda tergantung pada keahlian yang dimiliki, seperti petugas karcis, petugas kandang, pengawas gajah, dan hewan-hewan lainnya, petugas wahana flying fox, petugas Out bond dan paint ball, petugas kebersihan dan lain-lain.

Setelah penulis melakukan penelitian, dan dari hasil beberapa wawancara yang penulis lakukan di lapangan dapat dijelaskan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan objek wisata resort kandi. Adapun faktor pendukung diantaranya : pertama, adanya arahan RTRW Kota Sawahlunto 2004-2014 yang menetapkan kawasan tambang tersebut dijadikan kawasan wisata, kedua, status lahan milik Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, setelah diserahkan oleh PT.BA melalui Surat Kesepakatan dan Perjanjian nomor: 06/08.04/2400000002/XI-2004 dan nomor : 180/11/Huk-Org/2004 tentang Penyerahan Lahan Pasca Tamka. Dalam surat kesepakatan dan perjanjian tersebut juga dituangkan bahwa penyerahan lahan tersebut disertai dengan dana reklamasi yang dibayarkan oleh PT.BA kepada Pemerintah Kota Sawahlunto sebesar Rp.1.283.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah), dan juga rencana pemanfaatan lahan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dengan memanfaatkan dana reklamasi yang diberikan, yaitu untuk pengembangan objek wisata resort kandi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPTD Kandi sebagai berikut :

“Beberapa faktor pendukung pengembangan kawasan kandi ini diantaranya, pertama, adanya arahan RTRW Kota Sawahlunto 2004-2014 yang menetapkan kawasan tambang tersebut dijadikan kawasan wisata, kedua, status lahan milik Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, setelah diserahkan oleh PT.BA pada tahun 2004”(hasil wawancara pada tanggal 4 Mei 2010).

Yang ketiga adalah lokasi kawasan kandi yang strategis, dimana berjarak hanya 2,5 Km dari jalan raya Sawahlunto-Talawi dan memiliki dua gerbang utama yaitu dari arah Sawahlunto dan arah Talawi. Sebagai mana yang disampaikan oleh Camat Talawi sebagai berikut :

“Salah satu faktor pendukung dikembangkannya kawasan kandi menjadi kawasan wisata adalah lokasinya yang strategis, dekat dari jalan raya dan memiliki pintu gerbang utama dari dua arah yang berbeda, sehingga memudahkan wisatawan untuk mencapai lokasi tersebut” (hasil wawancara pada tanggal 3 Mei 2010).

Faktor pendukung yang keempat adalah produktivitas lahan yang rendah untuk pertanian, dikarenakan kawasan tersebut merupakan kawasan terbuka dan gersang serta merupakan kawasan bekas lokasi pertambangan terbuka yang dilakukan oleh PT.BA, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Kolok Mudiak sebagai berikut :

“Menurut saya salah satu faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata resort kandi itu adalah tingkat produktifitas lahan yang rendah untuk pertanian, karena kawasan itu merupakan kawasan yang sudah terbuka dan gersang, setelah ditinggalkan oleh PT.BA” (hasil wawancara pada tanggal 3 Mei 2010).

Faktor pendukung kelima adalah adanya peningkatan perekonomian masyarakat sekitar kawasan, hal ini sesuai dengan penjelasan salah seorang tokoh masyarakat di kenagarian Sijantang dan juga sebagai Ketua LKAAM Kota Sawahlunto yaitu Bapak Drs.Adi Muaris Beliau menyampaikan sebagai berikut :

“Dilihat dari sisi manfaat untuk masyarakat menurut saya dengan dikembangkannya objek wisata kandi ini, maka perekonomian

masyarakat setempat juga mulai naik, karena banyaknya masyarakat yang berdagang apalagi disaat ada event-event seperti pacu kuda, road race dan motor cross, jadi menurut saya hal ini bisa dikatakan sebagai salah satu faktor pendukung dikembangkannya objek wisata kandi ini" (hasil wawancara pada tanggal 19 Mei 2010).

Faktor pendukung yang lain dalam pengembangan objek wisata resort kandi diantaranya adalah ; kuantitas jaringan jalan yang memadai, potensi kawasan wisata seluas 393,45 Ha, potensi hutan kota dari hutan rakyat dan daerah reboisasi, serta kuantitas sumberdaya manusia yang tersedia sebagai mana yang telah disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto sebagai berikut :

"Beberapa faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata resort kandi ini menurut saya diantaranya, jaringan jalan yang memadai, potensi kawasan yang luas yaitu seluas 392,45 Ha, potensi hutan kota yang dulunya dari hutan rakyat dan sebagian dari daerah reboisasi, dan yang lebih penting adalah dengan banyaknya sumber daya manusia yang tersedia terutama masyarakat sekitar kawasan kandi itu sendiri" (hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2010).

Selain dari faktor pendukung di atas juga terdapat faktor penghambat atau kendala dalam pengembangan objek wisata resort kandi diantaranya : yang pertama adalah ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana pariwisata belum ada terutama menyangkut fasilitas pelayanan pariwisata seperti pelayanan angkutan wisata, fasilitas penginapan, kurangnya perawatan objek wisata, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Camat Talawi sebagai berikut :

"Menurut saya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian oleh pengelola saat ini terutama dalam penyediaan fasilitas pelayanan pariwisata seperti angkutan wisata, fasilitas penginapan, dan kurangnya perawatan sarana wisata yang telah ada, kalau hal ini tidak ditindaklanjuti maka menurut saya ini akan menjadi rintangan atau permasalahan dalam pengembangan kawasan wisata itu sendiri terutama dalam usaha menarik wisatawan " (hasil wawancara pada tanggal 3 Mei 2010).

Yang kedua adalah keterbatasan dana atau anggaran dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata resort kandi, hal ini menyebabkan terbatasnya kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan objek wisata resort kandi itu sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPTD Kandi sebagai berikut:

"Saat ini yang menjadi kendala bagi kami sebagai pengelola kawasan kandi ini adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki, sehingga dalam pelaksanaan pengembangan objek yang ada harus dilaksanakan secara bertahap" (hasil wawancara pada tanggal 4 Mei 2010).

Yang ketiga adalah masih adanya sebagian niniak mamak yang belum bisa mengakui kawasan tersebut milik Pemerintah Kota Sawahlunto, karena sebagian dari kawasan seluas 393,45 Ha, ada yang diperoleh melalui pesta adat. Dan sebagian niniak mamak menganggap bahwa tanah tersebut belum diganti rugi dan mereka memegang prinsip "*Kabau Pai Kubangan Tingga*" artinya bahwa setelah dilakukannya eksploitasi batu bara, dan tidak lagi digunakan, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah ulayat. Hal tersebut menjadi salah satu penghalang ataupun penghambat masuknya investor dari luar, karena masalah kapastian kepemilikan lahan merupakan hal yang sangat prinsip bagi investor. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tokoh Kenagarian Sijantang yang juga menjabat sebagai Ketua LKAAM Kota Sawahlunto sebagai berikut :

"Salah satu penghambat proses pengembangan Kawasan Kandi ini menurut saya adalah tidak adanya kata sepakat di antara niniak mamak untuk mengakui bahwa tanah yang termasuk dalam kawasan kandi seluas 393,45 Ha itu adalah milik syah Pemerintah Kota Sawahlunto, karena sudah diserahkan oleh PT.BA pada tahun 2004 yang lalu. Sebagian mereka masih berprinsip bahwa "*Kabau Pai Kubangan Tingga*", sehingga mereka masih menganggap bahwa sebagian dari

kawasan kandi tersebut adalah tanah ulayat, hal tersebut mengakibatkan adanya kegamangan investor untuk masuk” (hasil wawancara pada tanggal 6 Mei 2010).

Faktor penghambat yang keempat menurut Ketua LKAAM Kota Sawahlunto adalah kondisi sosial masyarakat sekitar kawasan kandi yang merupakan masyarakat agamis, dan kehidupan sehari-hari selalu terkait dengan kelembagaan adat. Oleh karena itu pengembangan pariwisata dibatasi pada objek dan atraksi yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Dan terakhir menurut Ketua LKAAM Kota Sawahlunto yang menjadi faktor penghambat adalah sebagai berikut :

“Perekonomian masyarakat di sekitar Kawasan Kandi secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan aktivitas wisata. Akan tetapi kemampuan investasi masyarakat di sekitar kawasan Resort Kandi untuk membangun objek dan sarana wisata masih terbatas. Dengan kondisi tersebut maka pengembangan wisata masih banyak bergantung kepada kemampuan investasi Pemerintah Daerah” (hasil wawancara pada tanggal 6 Mei 2010).

Dari uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa faktor ekonomi masyarakat sekitar menjadi hal yang sangat penting atau berpengaruh dalam pengembangan objek wisata resort kandi, karena dengan demikian investasi untuk pengembangan kawasan kandi betul-betul tergantung pada kemampuan finansial yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

Namun demikian beberapa waktu yang lalu sudah ada salah seorang warga Kota Sawahlunto yang memiliki modal yang cukup besar dan berkeinginan untuk berinvestasi di sekitar kawasan kandi, dimana dengan modal pribadi akan membangun sebuah kawasan wahana wisata yang lebih dikenal dengan “Sawahlunto Dream Land”. Dengan mengedepankan konsep wisata di alam terbuka dengan wahana permainan yang beragam, namun saat

penelitian ini dilakukan pekerjaan pembangunan Sawahlunto Dream Land baru akan dimulai dan diperkirakan awal tahun 2011 mendatang sudah bisa dinikmati oleh wisatawan .



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kota Sawahlunto untuk pengembangan objek wisata Resort Kandi adalah sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kota menyusun master plan kandi yang merupakan acuan dalam pengembangan kawasan Resort kandi yang diimplementasi pada tahun 2003 dan dilakukan beberapa perubahan pada tahun 2005, namun sampai saat penulis melakukan penelitian master plan tersebut belum dilegal formalkan menjadi sebuah Peraturan Walikota (Perwako) maupun Peraturan Daerah (Perda).
 - b. Pemerintah Kota membentuk Unit Pelaksana Teknis Dlnas (UPTD) Kandi yang bertujuan agar pengelolaan kawasan kandi lebih serius dan terarah.
 - c. Menciptakan citra Resort Terpadu pada kawasan kandi dan sekitarnya sebagai proyek strategis di sisi utara Kota Sawahlunto.
 - d. Mengembangkan kawasan kandi dan sekitarnya sebagai bagian wilayah yang terpadu dengan dengan wilayah lainnya di Kota Sawahlunto namun memiliki identitas tersendiri diantara berbagai perkembangan pembangunan di Kota Sawahlunto.
 - e. Memperkuat identitas kawasan melalui pengembangan fungsi dan rancang kota pada masing-masing jalur masuk kawasan.

- f. Menciptakan keterpaduan antar bentuk dan ruang pada kawasan sekitarnya.
 - g. Mengutamakan penghijauan (landscape) yang sesuai dengan iklim daerah tropis serta ruang terbuka yang berperan positif bagi pembangunan kawasan terpadu.
 - h. Meningkatkan kualitas lingkungan binaan yang berada didalam kawasan kandi maupun disekitarnya.
 - i. Menyediakan suatu Resort dan olahraga terpadu yang dapat dinikmati oleh seluruh warga kota maupun wisatawan.
 - j. Penataan lingkungan bagian kawasan kota Sawahlunto secara terpadu, dimana fungsi utama kawasan adalah untuk wisata dan rekreasi seperti taman, tempat berkemah, kebun binatang mini, stadion olah raga dan pacu kuda serta terdapat juga fasilitas hotel dengan fasilitas pendukungnya dan juga terdapatnya kawasan lingkungan perumahan ditampung dalam sebuah lahan tunggal.
2. Program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto untuk pengembangan Resort Kandi, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto pada tahun 2009 adalah Program Destinasi Pariwisata yang memanfaatkan dana APBD Kota Sawahlunto sebesar Rp. 2.593.466.500,- dengan kegiatan antara lain :
- a. Operasional dan pengelolaan sarana wisata air.
 - b. Operasional dan Pengelolaan Aneka Mainan Bermotor.
 - c. Operasional dan Pemeliharaan Taman Satwa Kandi.
 - d. Pemeliharaan Plaza, Gazebo, Dermaga Danau Tandikek dan Gerbang Utama Masuk Kawasan Wisata Kandi.

- e. Operasional dan Pengelolaan Area Road Race.
 - f. Penataan Landscape Sirkuit Aneka Mainan Bermotor.
 - g. Lanjutan Pengembangan Taman Satwa Kandi.
 - h. Operasional Pengelolaan Outbound.
3. Hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sawahlunto untuk pengembangan objek wisata Resort Kandi terlihat dari jumlah kunjungan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 jumlah kunjungan sebanyak 33.303, dengan jumlah PAD yang diterima pada tahun tersebut adalah sebesar Rp. 96.233.000,- meningkat secara signifikan pada tahun 2008 yaitu sebesar 150,86 % menjadi 83.543 pengunjung, dengan jumlah PAD yang diterima sebesar Rp. 454.803.500,-. Namun pada 2009 peningkatan jumlah kunjungan hanya 1,91 % dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 85.139 orang pengunjung, dan jumlah PAD yang diterima pada tahun tersebut adalah sebesar 674.708.000,-.
4. Beberapa faktor pendukung pengembangan Objek Wisata Resort Kandi diantaranya :
- a) Arahan RTRW Kota Sawahlunto 2004-2014 yang menetapkan kawasan bekas tambang tersebut dijadikan kawasan wisata.
 - b) Status lahan milik Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, setelah diserahkan oleh PT.BA melalui Surat Kesepakatan dan Perjanjian nomor: 06/08.04/2400000002/XI-2004 dan nomor : 180/11/Huk- Org/2004 tentang Penyerahan Lahan Pasca Tamka. Dalam surat kesepakatan dan perjanjian tersebut juga dituangkan bahwa penyerahan lahan tersebut disertai dengan dana reklamasi yang

dibayarkan oleh PT.BA kepada Pemerintah Kota Sawahlunto sebesar Rp.1.283.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah), dan juga rencana pemanfaatan lahan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dengan memanfaatkan dana reklamasi yang diberikan, yaitu untuk pengembangan objek wisata resort kandi.

- c) Lokasi yang strategis, dimana berjarak 2,5 km dari jalan raya sawahlunto talawi dan memiliki dua gerbang utama yaitu dari arah Sawahlunto dan arah Talawi.
 - d) Produktivitas lahan rendah untuk pertanian, dikarenakan kawasan tersebut merupakan kawasan terbuka dan gersang serta merupakan kawasan bekas lokasi pertambangan terbuka yang dilakukan oleh PT.BA.
 - e) Peningkatan perekonomian masyarakat sekitar kawasan.
 - f) Kuantitas jaringan jalan yang memadai.
 - g) Potensi kawasan wisata seluas 393,45 Ha.
 - h) Potensi hutan kota dari hutan rakyat dan daerah reboisasi.
 - i) Kuantitas sumberdaya manusia yang tersedia.
5. Beberapa faktor Penghambat pengembangan Objek Wisata Resort kandi diantaranya :
- a) Ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana pariwisata belum ada terutama menyangkut fasilitas pelayanan pariwisata seperti pelayanan angkutan wisata, fasilitas penginapan, kurangnya perawatan objek wisata.

- b) Keterbatasan dana atau anggaran dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata Resort Kandi, hal ini menyebabkan terbatasnya kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan objek wisata Resort Kandi.
- c) Masih adanya sebagian niniak mamak yang belum mengakui kawasan tersebut milik pemerintah Kota Sawahlunto, karena sebagian dari kawasan seluas 393,45 Ha, ada yang diperoleh melalui pesta adat. Dan sebagian niniak mamak menganggap bahwa tanah tersebut belum diganti rugi dan mereka memegang prinsip "*Kabau Pai Kubangan Tingga*" artinya bahwa setelah dilakukannya eksploitasi batu bara, dan tidak lagi digunakan, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah ulayat.
- d) Masyarakat sekitar Resort Kandi merupakan masyarakat yang agamais dan kehidupan sehari-hari terkait dengan kelembagaan adat. Oleh karena itu pengembangan pariwisata dibatasi pada objek dan atraksi yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut.
- e) Perekonomian masyarakat di sekitar Kawasan Resort Kandi secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan aktivitas wisata. Akan tetapi kemampuan investasi masyarakat di sekitar kawasan Resort Kandi untuk membangun objek dan sarana wisata masih terbatas. Dengan kondisi tersebut maka pengembangan wisata masih banyak bergantung kepada kemampuan investasi Pemerintah Daerah.

B. SARAN

Dalam rangka pengembangan Objek Wisata Resort Kandi kedepan ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan kepada Pemerintah Kota Sawahlunto, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Resort Kandi merupakan suatu kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan terpadu, untuk itu diperlukan rencana yang matang melalui penelitian yang komprehensif untuk pengembangannya, dan rencana tersebut haruslah dijadikan dasar dan diperkuat melalui Peraturan Walikota ataupun Peraturan Daerah, sehingga rencana tersebut memiliki dasar yang kuat sebagai acuan dalam proses pengembangan Objek Wisata Resort Kandi.
2. Dalam rangka menjadikan kawasan Resort Kandi sebagai ikon wisata di Kota Sawahlunto perlu disiapkan sarana prasarana wisata seperti fasilitas penginapan, sarana transportasi, penambahan wahana wisata, akses jalan yang bagus, dan perawatan terhadap objek atau wahana wisata yang ada. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Resort kandi.
3. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar Kawasan Resort Kandi, diharapkan Pemerintah Kota dapat menyediakan sarana prasarana dan fasilitas bagi warga setempat untuk dapat berusaha berdasarkan kemampuan mereka, seperti berdagang, dan menjadi karyawan petugas di Kawasan Resort kandi.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Arikunto, Suharsimi, 1996. *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Malo, Manasse dan Sri Trisnoningtias. 1985. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Karunika, Universitas Terbuka Jakarta.
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Methods for Development Work and Research : A guide for Practitioners*. Terjemahan Matheos Nalle : *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nugroho D, Riant, 2003, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Neuman, Lawrence. 1997. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. 3rd Edition, Boston : Allyn and Bacon
- Romli, Lili, 2007, *Potert Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Said, Mas'ud, M, 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta.

II. Dokumen dan Undang-Undang.

Kecamatan Dalam Angka Tahun 2009.

Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2009

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009

Laporan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2009.

PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2008.

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto tahun 2004-2014.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto tahun 2008-2013.

Rancangan Master Plan Pengembangan Resort Kandi.

Rencana Strategis (Renstra) Kota Sawahlunto Tahun 2003-2008

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Sawahlunto Tahun 2001.

Surat Kesepakatan dan Perjanjian nomor : 06/08.04/2400000002/XI-2004 dan nomor : 180/11/Huk-Org/2004 tentang Penyerahan Lahan Pasca Tamka

III. Sumber lain

(<http://library.usu.ac.id/download/fp/hutan-siti5.pdf> : Minggu 7 Maret 2010 : 21.00 WIB)

(<http://elibrary.mb.ipb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=mbipb-12312421421421412-partomo-409>: Rabu 7 April 2010 : 20.30 WIB).

(<http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptitbpp-gdl-s2-2005-muhammadmu-1815> Rabu 7 April 2010 : 20.30 WIB).

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

“KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA RESORT KANDI”

I. Aparat Pemerintah Kota Sawahlunto (Kepala Dinas, Kabid Program dan Kasi Proglap Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto) :

1. Apa yang mendasari atau yang melatarbelakangi sehingga Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto mengambil kebijakan untuk menjadi kawasan kandi menjadi objek wisata?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata khususnya Objek Wisata Resort Kandi?
3. Dari luas kawasan resort kandi yang ada bagaimana Pemerintah Kota Sawahlunto dapat membagi kawasan tersebut menjadi kawasan wisata?
4. Program-program apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam hal ini Dinas Pariwisata menyangkut pengembangan dan pengelolaan kawasan objek wisata resort kandi?
5. Apa target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dengan dikembangkannya Objek Wisata Resort Kandi?
6. Bagaimana pemerintah Kota Sawahlunto mensosialisasikan program-program pengembangan objek wisata resort kandi kepada masyarakat sekitar kawasan?

7. Bagaimana respon yang diberikan oleh masyarakat sekitar kawasan dengan adanya kebijakan pemerintah daerah untuk mengembangkan objek wisata resort kandi?
8. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan objek wisata resort kandi?

II. Camat dan Kepala Desa

1. Bagaimana menurut pandangan Bapak terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sawahlunto dalam pengembangan objek wisata resort kandi?
2. Sejauh mana peran serta Bapak sebagai aparat ditingkat kecamatan dan desa dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah daerah Kota sawahlunto dalam mengembangkan objek wisata resort kandi?
3. Bagaimana respon yang diberikan masyarakat Bapak sekaitan dengan adanya kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto untuk mengembangkan kawasan kandi menjadi objek wisata?
4. Bagaimana peran serta masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah Kota Sawahlunto dalam pengembangan objek wisata resort kandi?
5. Manfaat apa saja yang diterima oleh masyarakat dengan dikembangkannya objek wisata resort kandi?
6. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan objek wisata resort kandi?

III. Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat).

1. Dari mana Bapak mengetahui bahwa adanya kebijakan pemerintah Kota Sawahlunto untuk mengembangkan kawasan kandi menjadi objek wisata?

2. Bagaimana peran serta masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah Kota Sawahlunto dalam pengembangan objek wisata resort kandi?
3. Manfaat apa saja yang diterima oleh masyarakat dengan dikembangkannya objek wisata resort kandi?
4. Menurut Bapak apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan objek wisata resort kandi?

